



**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
BADUNG COMMAND CENTER**



**Pembangunan
Aplikasi**



**Pengembangan
Akses Internet**



**Keterbukaan
Informasi Publik**



Komunitas KIM



Keamanan Informasi



Data Statistik

**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa karena berkat Asung Kerta Wara Nugraha-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Penyusunan LKjIP ini dilakukan dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang berdayaguna dan berhasil guna berdasarkan pada prinsip-prinsip Good Governance sebagai usaha untuk mewujudkan demokratisasi, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas yang menjadi tugas pemerintah saat sekarang ini. Hal ini merupakan suatu prasyarat dalam penyusunan mekanisme program, pelaksanaan, pemantauan dan pengevaluasian pembangunan. Untuk itu diperlukan suatu alat ukur yang mana diharapkan bisa menjawab tantangan pembangunan dimasa depan yang semakin dinamis, yang dimulai dari Unit / Instansi yang ada dalam pemerintahan itu sendiri.

Visi dan misi yang dalam penilaiannya harus sesuai dengan tugas yang diemban oleh instansi pemerintah dan diharapkan dapat dibuktikan dalam uraian tugas secara terukur serta dapat dipertanggung jawabkan melalui Perencanaan Strategis (Renstra), Perjanjian Kinerja (PK) maupun Pengukuran Kinerja.

Kami menyadari bahwa Laporan ini masih sangat jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan dari semua pihak. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2024 dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Mangupura, 06 Maret 2025



Kepala Dinas Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Badung,

I Gusti Nourah Gede Jaya Saputra, S.Sos.,M.A.P

Pembina Utama Muda

NIP. 19750207199311 1 002

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Gambar	iv
Daftar Tabel	v
Ringkasan Eksekutif	vi
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Gambaran Umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung	2
1.4 Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan	5
BAB II Perencanaan Kinerja	8
2.1 Rencana Strategis	8
2.2 Indikator Kinerja Utama	11
2.3 Perjanjian Kinerja	12
2.4 Cascading	14
BAB III Akuntabilitas Kinerja	17
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja	18
3.2 Analisis Capaian Kinerja	22
3.3 Akuntabilitas Keuangan	56
BAB IV Penutup	63
4.1 Kesimpulan	63
4.2 Saran	65

DAFTAR GAMBAR/GRAFIK

Halaman

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung	7
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung	15
Grafik 3.1	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase aplikasi pemerintahan yang terintegrasi	26
Grafik 3.2	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Kelompok KIM yang melaksanakan diseminasi informasi kebijakan dan Program Prioritas Nasional dan Prioritas Daerah Tahun 2023 - 2024.....	33
Grafik 3.3	Prosentase Informasi Daerah yang Terjaga Kerahasiaan dan Keamanannya sesuai Perundang-Undangan.....	43
Grafik 3.4	Target dan realisasi Indikator Persentase Data Statistik Sektoral Kabupaten Badung Yang Dimanfaatkan Oleh Perangkat Daerah Dalam Melakukan Perencanaan Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	55

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung 2021-2026	9
Tabel 2.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung 2021-2026.....	10
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2021-2026	11
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2024	13
Tabel 3.1	Target dan Realisasi Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2024	17
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Serta Target dan Realisasi Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2021-2026	19
Tabel 3.3	Analisis Pencapaian Sasaran 1 Meningkatnya tatakelola pemerintahan serta kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi	24
Tabel 3.4	Daftar Aplikasi Pemerintah Yang Terbangun dan Terintegrasi Tahun 2022-2024	27
Tabel 3.5	Perbandingan Nilai Indek Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 dengan Kabupaten Gianyar	30
Tabel 3.6	Daftar Desa/Kelurahan di Kecamatan yang telah membentuk Kelompok KIM tahun 2017 s/d 2023	34
Tabel 3.7	Analisis Pencapaian Sasaran 2 Meningkatkan Tata kelola Persandian Untuk Menjaga Kerahasiaan Serta Keamanan Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah	40
Tabel 3.8	Perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah kabupaten badung tahun 2024.....	46
Tabel 3.9	Target dan Realisasi Data Statistik Sektoral Kabupaten Badung yang Dimanfaatkan dalam Melakukan Perencanaan Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tahun 2022-2024.....	54
Tabel 3.10	Pagu Anggaran Dan Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Capaian Indikator Sasaran Strategis Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2024	57

RINGKASAN EKSEKUTIF

Memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta pengelolaan resources yang tersedia. Penyusunan LKJIP berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan. Secara singkat Laporan ini berisi tentang tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung menyangkut urusan komunikasi dan informatika yang ditunjukkan dengan beberapa tabel antara lain : Renstra Tahun 2021 - 2026 , Rencana Kerja Tahunan (Tabel RKT) Tahun 2024, Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 Perubahan dan Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan tahun 2024.

Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan 3 (tiga) urusan yaitu Urusan Komunikasi dan Informatika, urusan Statistik dan urusan Persandian. Untuk mengukur capaian kinerjanya ditetapkan 3 (Tiga) sasaran dengan 6 (Enam) indikator sebagai alat ukurnya, ke enam indikator tersebut mendukung misi ke 2 Bupati dari 9 misi yang ditetapkan. Adapun misi ke 2 Bupati tersebut adalah “ Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan berdasarkan prinsip good governance dan clean goverment yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi “.

Capaian kinerja sasaran 1 yaitu semakin Meningkatnya tatakelola pemerintahan serta kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi dengan alat ukur 3 (tiga) indikator yaitu : Indikator 1 ;Persentase aplikasi pemerintahan yang terintegrasi capaian kinerjanya **120 %** dengan demikian target tahun 2024 sebesar **60 %** (15 aplikasi) dan terealisasi sebesar **72 %** (18 aplikasi), melebihi

target sebesar **12 %** (3 Aplikasi) yang sudah dibangun dan terintegrasi, dengan serapan anggaran sebesar **Rp 2,098,313,940,-** sama 78 %.

Indikator 2 ; Persentase lokasi yang terkoneksi jaringan intranet/internet di Kabupaten Badung, dalam Renstra 2021 - 2026 ditargetkan pelaksanaannya pada tahun 2023 dengan capaian kikerja di sebesar **100%** dengan lokasi yang terkoneksi jaringan intranet/internet sebanyak 22 lokasi yang merupakan pengembangan atas lokasi lokasi yang terkoneksi intranet /internet yang sebelumnya (tahun 2018) sudah terkoneksi 988 lokasi strategis, sehingga tahun 2023 di Kabupaten Badung sebanyak 1010 lokasi sudah terkoneksi jaringan intranet/internet.

Indikator 3; Indeks keterbukaan informasi publik dengan capaian kinerja **123,34 %**. Dimana target yang ditetapkan di tahun 2024 sebesar 80 Nilai Indeks dengan realisasi sebesar 98,67 serapan anggaran sebesar **Rp. 7,374,303,200,-** atau sama dengan **95 %**.

Indikator 4; Persentase Kelompok KIM yang melaksanakan diseminasi informasi kebijakan dan Program Prioritas Nasional dan Prioritas Daerah dengan capaian kinerja **106 %**. Target di tahun 2024 sebesar **84 %** (48 kelompok) dengan realisasi **95 %** (54 kelompok). Dengan serapan anggaran sebesar **Rp. 256,564,480,-** atau sama dengan **86 %**.

Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika yang ke 2 adalah Sasaran yang menyangkut Urusan Persandian yaitu Meningkatnya Tata kelola Persandian Untuk Menjaga Kerahasiaan Serta Keamanan Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah. Capaian kinerja sasaran 2 dengan Indikator Persentase informasi daerah yang terjaga kerahasiaan dan keamanannya sesuai perundang-undangan sebesar **100 %**. Adapun serapan anggaran dari indikator ini yaitu sebesar **Rp. 13,888,500,-** atau sama dengan **82 %**.

Urusan Statistik menetapkan satu sasaran yang merupakan sasaran ke 3 yaitu Tersedianya Data Statistik Sektoral Dalam Perencanaan Dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Indikator dari sasaran 3 ini adalah Persentase data statistik sektoral Kabupaten Badung yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah dalam melakukan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah, dengan capaian kinerja sasaran sebesar **100 %**. terbentuknya Forum Satu Data Daerah Kabupaten Badung terdapat 37 Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah. Perbandingan target dan realisasi data statistik sektoral kabupaten badung yang dimanfaatkan dalam melakukan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah. Dengan serapan anggaran dari indikator ini yaitu sebesar **Rp 70,305,100,-**. atau sama dengan **88 %**.

Selanjutnya rata – rata capaian kinerja dengan 3 (Tiga) sasaran mencakup 6 (Enam) indikator kinerja utama dalam kurun waktu 1 (Satu) tahun yaitu di Tahun 2024 sebesar **107,11 %** yang berarti termasuk dalam kategori sangat baik. Bertitik tolak dari Data yang dicapai, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan-kegiatan Dinas , Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung urusan Komunikasi dan informatika memiliki tingkat keberhasilan sesuai dengan harapan, walaupun ada beberapa kegiatan yang perlu mendapat perhatian lebih untuk keberhasilannya dimasa-masa yang akan datang.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan salah satu teknologi yang berkembang pesat. Pesatnya perkembangan TIK akan membuka peluang dan tantangan untuk menciptakan, mengakses, mengolah, dan memanfaatkan informasi secara tepat dan akurat. Informasi merupakan suatu komoditi yang sangat berharga di era globalisasi untuk dikuasai dalam rangka meningkatkan daya saing suatu organisasi (termasuk Pemerintah Daerah) secara berkelanjutan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah republik Indonesia telah membuat kebijakan untuk memanfaatkan TIK untuk membangun Electronic Government for Good Governance yang terintegrasi mulai dari tingkat pemerintahan daerah hingga ke pusat. Tujuannya adalah agar infrastruktur TIK yang dibangun dapat dimanfaatkan secara bersama untuk berkoordinasi oleh seluruh instansi.

Salah satu amanah dari Dinas Komunikasi dan informatika adalah mengintegrasikan sistem menuju smart city dengan melakukan sinergitas dalam tata kelola informasi, Dinas Komunikasi dan Informatika fokus pada ekosistem TIK smart city yang artinya Dinas Kominfo tidak hanya mengambil data – data internal pemerintahan ataupun dinas – dinas tapi juga mempunyai kewajiban untuk mengintegrasikan layanan yang diluar pemerintahan. Pembangunan komunikasi dan informatika merupakan gabungan antara pengembangan infrastruktur memadai dan tersedianya layanan komunikasi dan informasi yang merata di semua wilayah tidak terkecuali di pedesaan. Selain Urusan Komunikasi dan Informatika Dinas Kominfo juga melaksanakan dua urusan lagi yaitu Urusan Persandian dan Urusan statistik.

Dengan demikian sebagai Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung wajib untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP), sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan didalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika.

1.2 Maksud dan Tujuan

1. Maksud :

Maksud Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung adalah sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan urusan komunikasi dan informatika Kabupaten Badung.

2. Tujuan :

- a) Memberikan informasi mengenai capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Badung selama Tahun Anggaran 2024;
- b) Bahan evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Badung untuk perbaikan di tahun – tahun berikutnya.
- c) Menyatakan tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas, sehingga tugas-tugas dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien dan responsive terhadap lingkungannya.
- d) Dorongan terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk tercapainya pemerintah yang baik dan terpercaya.

1.3 Gambaran Umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung

Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan daerah di bidang Pengelolaan Teknologi, Informasi, Komunikasi, urusan Persandian dan Urusan Statistik serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dimana dalam setiap kegiatannya selalu berhubungan dengan pembangunan dan pengembangan system Informasi, pengembangan

dan pemeliharaan jaringan intranet/internet, pengelolaan informasi dan publikasi, penyampaian data statistik serta pengelolaan persandian untuk pengamanan informasi.

Berdasarkan UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, PP. No 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Perda Kabupaten Badung Nomor 20 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Badung no 78 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi , Tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah, pada bulan Januari tahun 2017 Dinas komunikasi dan Informatika terbentuk sebagai OPD baru yang dalam tugas pokok dan fungsinya melaksanakan tiga urusan yaitu Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik dan Urusan Persandian.

Aspek strategis Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya adalah perkembangan teknologi informasi dalam membangun pemerintahan berbasis e-gov menjadikan tantangan sekaligus peluang dalam pengembangan jaringan prasarana dan jaringan pelayanan informasi dan komunikasi yang terpadu, efektif dan efisien.

Adapun isu – isu strategis yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung antara lain:

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlatih di masing – masing OPD untuk pelaksanaan e – gov di Kabupaten Badung.
2. Optimalisasi keamanan dan kenyamanan masyarakat dan wisatawan Kabupaten Badung sebagai daerah destinasi pariwisata internasional yang merupakan potensi peningkatan PAD Kabupaten Badung.
3. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik untuk mewujudkan Kabupaten Badung menuju smart city.
4. Optimalisasi data informasi daerah untuk tujuan publikasi yang jelas dan transparan.
5. Optimalisasi tata kelola persandian untuk tujuan keamanan dan kerahasiaan informasi daerah.

- **URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Urusan Komunikasi dan Informatika merupakan salah satu urusan yang pada Dinas Komunikasi dan Informatika yang mendukung penerapan Pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (ICT) atau e - Government. Melalui urusan Komunikasi dan Informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung membangun infrastruktur jaringan intranet/internet di Kabupaten Badung yang merupakan sekumpulan komponen fiskal dan logikal yang menyediakan dasar untuk konektivitas keamanan, routing, pengaturan, akses dan fitur integral pada jaringan yang merupakan dasar dalam pelaksanaan pemerintahan berbasis teknologi informasi, dengan demikian penerapan konsep smart city dapat diterapkan di Kabupaten Badung serta keterbukaan informasi publik bisa lebih cepat, tepat dan transparan. Selain hal tersebut melalui urusan kominfo Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Badung membentuk Kelompok Komunikasi dan Informasi Masyarakat (KKIM) sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat melalui informasi.

- **URUSAN STATISTIK**

Urusan Statistik merupakan urusan yang dilaksanakan oleh dinas komunikasi dan Informatika yang memiliki tugas pokok fungsi menyiapkan data statistik yang cepat, tepat, rinci dan relevan sesuai kebutuhan masyarakat dan kebutuhan manajemen kebijakan. Setiap tahunnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung menyajikan Dokumen Statistik yang berisi data statistik Kabupaten badung yang bersifat spesifik, terukur, terjangkau, relevan sesuai masa waktunya. Selain itu juga berguna untuk mengevaluasi dampak kebijakan pembangunan.

- **URUSAN PERSANDIAN**

Urusan persandian berperan melakukan upaya melindungi keamanan informasi milik Pemerintah Kabupaten Badung, baik rahasia maupun terbuka, serta mendukung kegiatan peringatan dini dalam rangka

pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap ancaman yang timbul pada kepentingan dan keamanan Daerah.

1.4 Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung. Berdasarkan peraturan – peraturan tersebut diatas, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut;

Tugas Pokok :

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yaitu :

1. Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik Kabupaten Badung.
2. Melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Bali.

Fungsi :

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung mempunyai fungsi antara lain :

1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik.
2. Melaksanakan kebijakan dibidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik yang ditetapkan.
3. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik.
4. Melaksanakan pembinaan, evaluasi dan pelaporan menyangkut urusan komunikasi, informatika, persandian dan statistik.
5. Melaksakan administrasi dinas Komunikasi dan Informatika.
6. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati Badung terkait tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.

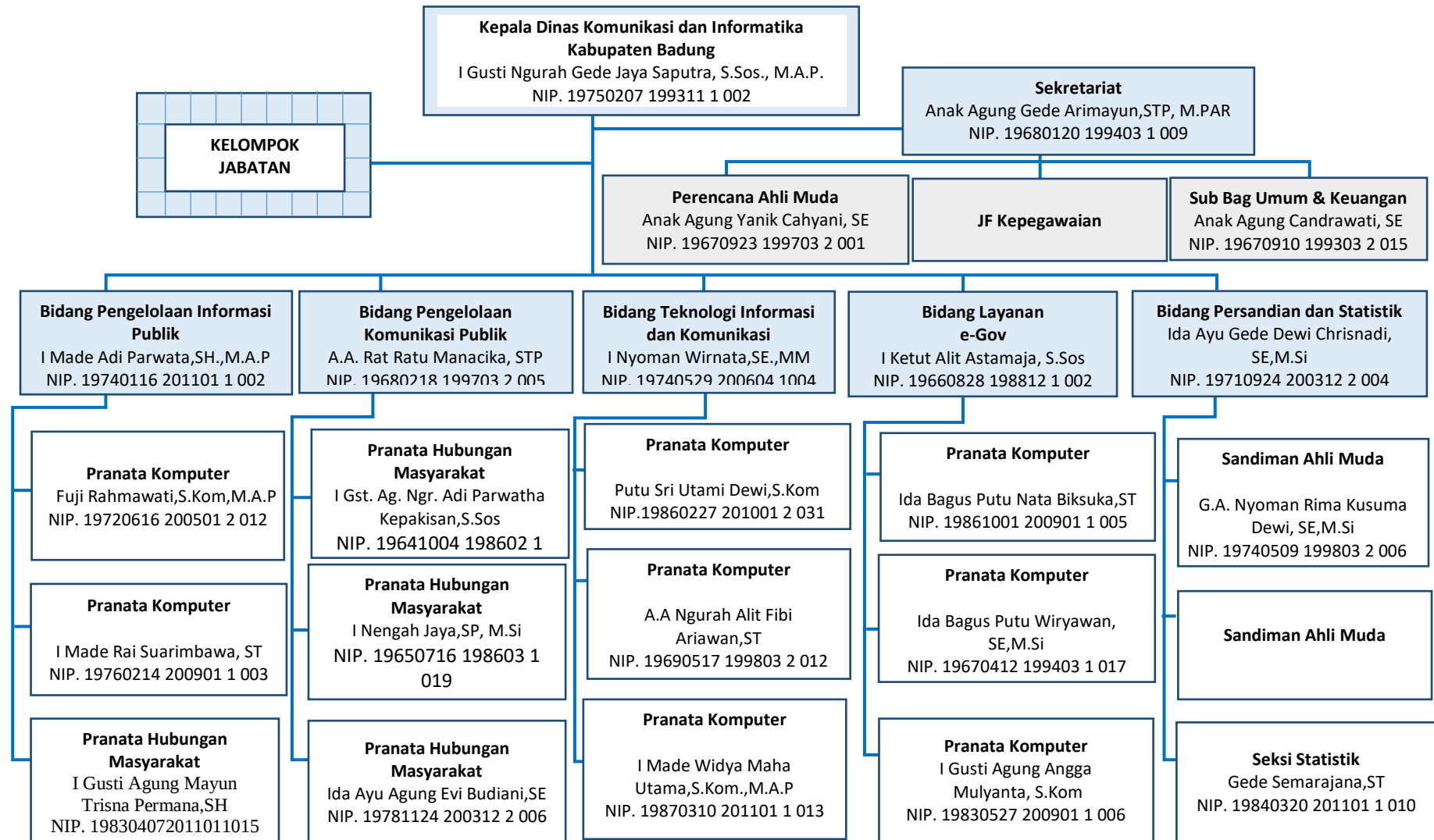
Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung

Sesuai dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 73 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung dipimpin oleh Kepala Dinas dengan dibantu oleh satu orang Sekretaris Dinas dan 5 Kepala Bidang.

Adapun staf yang mendukung pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2024, seluruhnya berjumlah 138 orang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 44 orang, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 8 orang, dan kontrak sebanyak 76 orang termasuk 1 Orang sopir. Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung secara jelas dapat dilihat pada gambar 1.1.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin terjadi.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya untuk menyelaraskan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Badung, Dinas komunikasi dan Informatika berpedoman pada dokumen perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika antara lain : Renstra 2021 – 2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan pertanggung jawaban terhadap keberhasilan / kegagalan atas target sasaran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Untuk efektifitas pencapaian target sasaran kinerja, disusun prioritas kinerja berupa program yang memiliki daya dukung dengan capaian sasaran pembangunan daerah sebagai langkah strategik dalam suatu sistem dan proses penyelenggaraan pemerintah dalam menerapkan visi dan misi Kepala Daerah yang telah ditetapkan.

2.1.1. Tujuan dan sasaran

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau di hasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Untuk mendukung terealisasinya pelaksanaan visi dan misi Kabupaten Badung, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung perlu menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan untuk memberikan arah terhadap tujuan yang hendak dicapai.

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari tujuan tertentu dengan target yang telah ditentukan. Dengan demikian tujuan yang telah ditetapkan selanjutnya dijabarkan lebih spesifik dalam bentuk sasaran, sehingga seyogyanya sasaran harus selaras dengan tujuan. Sasaran itu sendiri hendaknya mampu menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui tindakan / kegiatan yang bersifat spesifik, rinci dapat diukur (kuantitatif) dan dapat dicapai (realistis), sinerjik dan berkelanjutan (sesuai dengan keadaan).

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung dalam melaksanakan Tugas pokok dan fungsinya melaksanakan 3 (Tiga) urusan menetapkan 1 (Satu) tujuan, 3 (Tiga) sasaran dan 6 (enam) indikator. Keterkaitan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung dengan visi dan misi Kabupaten Badung menyangkut Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik serta Urusan Persandian adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2021-2026

VISI : Melanjutkan Kebahagiaan Masyarakat Badung Melalui Pembangunan Yang Berlandaskan Tri Hita Karana	
MISI 2 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Berdasarkan Prinsip Good Governance dan Clean Government yang Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.	
Tujuan	Sasaran
Terwujudnya pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk mendukung Kabupaten Badung menuju Smartcity	1 Meningkatkan tatakelola pemerintahan serta kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi
	2 Tersedianya data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah
	3 Meningkatnya tata kelola persandian untuk menjaga kerahasiaan serta keamanan informasi dan komunikasi di lingkungan pemerintah daerah

Dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung menetapkan strategi dan arah kebijakannya, seperti dalam tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
Terwujudnya pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk mendukung Kabupaten Badung menuju Smartcity	1 Meningkatkan tatakelola pemerintahan serta kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi	1 Meningkatkan pemanfaatan Sistem Teknologi.	1 Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana teknologi informasi
			2 Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Pengelola Teknologi Informasi
	2 Tersedianya data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	1 Meningkatkan kualitas data statistik sektoral yang akurat, transparan dan terintegrasi.	1 Meningkatkan kualitas data statistik sektoral melalui kerjasama dengan instansi terkait
	3 Meningkatnya tata kelola persandian untuk menjaga kerahasiaan serta keamanan informasi dan komunikasi di lingkungan pemerintah daerah	1 Meningkatkan pengamanan informasi dan komunikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah	1 Meningkatkan tatakelola persandian serta operasional pengamanan informasi dan komunikasi

2.2 Indikator Kinerja Utama

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis. Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Badung Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2021 – 2026, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung menetapkan Indikator Kinerja Utama pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung
Tahun 2021-2026

NO.	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR SASARAN	
1	2	3		4	
1	Terwujudnya Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik mendukung Kabupaten Badung menuju smart city	1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan serta kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi	1	Persentase aplikasi pemerintahan yang terintegrasi
				2	Persentase lokasi yang terkoneksi jaringan intranet/internet di Kabupaten Badung
				3	Indeks keterbukaan informasi publik
				4	Persentase Kelompok KIM yang melaksanakan diseminasi informasi kebijakan dan Program Prioritas Nasional dan Prioritas Daerah
		2	Tersedianya data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	5	Persentase data statistik sektoral Kabupaten Badung yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah dalam melakukan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah

		3	Meningkatnya tata kelola persandian untuk menjaga kerahasiaan serta keamanan informasi dan komunikasi di lingkungan pemerintah daerah	6	Persentase informasi daerah yang terjaga kerahasiaan dan keamanannya sesuai perundang - undangan

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja yang merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Dalam menyusun Perjanjian Kinerja, indikator kinerja dan target yang diperjanjikan adalah Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung yang telah ditetapkan dan diintegrasikan dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2021-2026.

Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Badung Tahun 2024

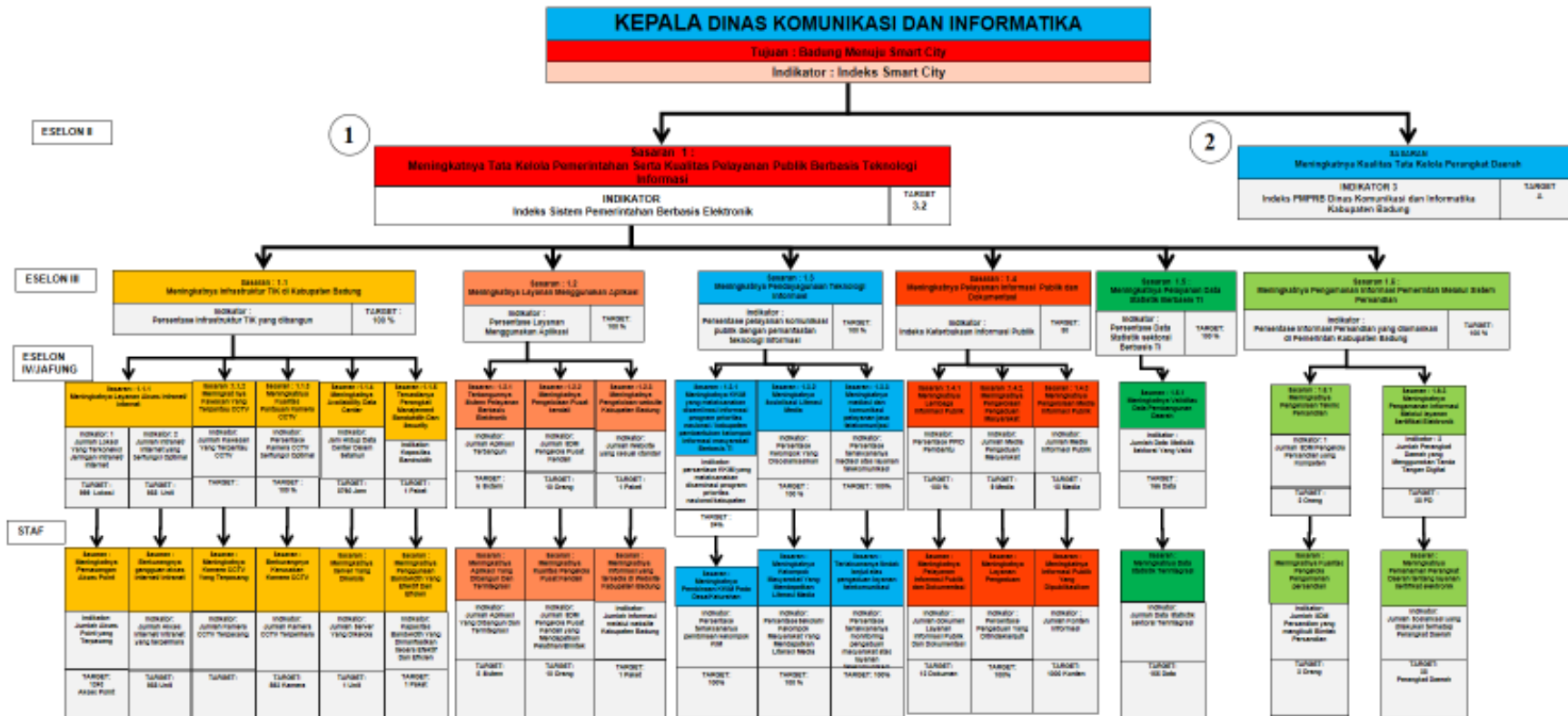
NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
1	Meningkatnya tatakelola pemerintahan serta kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi	1	Persentase aplikasi pemerintahan yang terintegrasi	Persen	60
		2	Persentase lokasi yang terkoneksi jaringan intranet/internet di Kabupaten Badung	Persen	0
		3	Indeks keterbukaan informasi publik	Nilai Indeks	80
		4	Persentase Kelompok KIM yang melaksanakan diseminasi informasi kebijakan dan Program Prioritas Nasional dan Prioritas Daerah	Persen	89
2	Tersedianya data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	5	Persentase data statistik sektoral Kabupaten Badung yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah dalam melakukan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Persen	100
3	Meningkatnya tata kelola persandian untuk menjaga kerahasiaan serta keamanan informasi dan komunikasi di lingkungan pemerintah daerah	6	Persentase informasi daerah yang terjaga kerahasiaan dan keamanannya sesuai perundang - undangan	Persen	100

2.4. Cascading

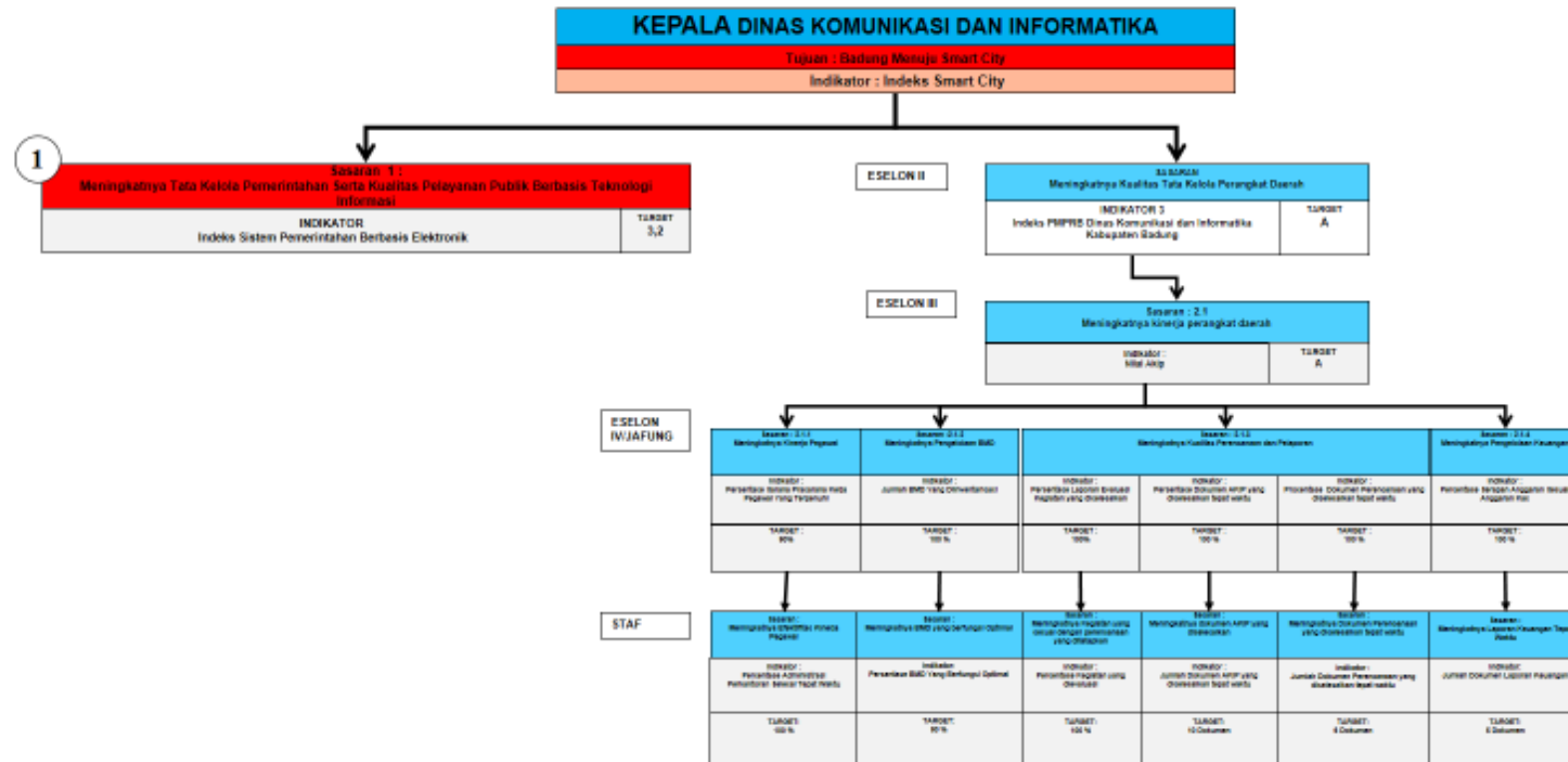
Cascading memiliki makna sebuah proses dalam bentuk pohon kinerja yang berisikan tahapan – tahapan didalam mewujudkan apa yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja. Cascading ini dibuat dari pucuk pimpinan sampai staf teknis sehingga memberikan kejelasan untuk mencapai target kinerja yang telah diperjanjikan dari pada masing – masing aparatur Kabupaten Badung.

Dengan disusunnya cascading di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung, dapat diketahui kegagalan dan keberhasilan dalam pencapaian kinerja setiap level eselon.

CASCADING KINERJA



CASCADING KINERJA



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sesuai amanat Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung selaku pengemban amanah Kepala Daerah Kabupaten Badung melaksanakan kewajiban untuk membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bentuk perwujudan kewajiban untuk pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kinerja organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban yang dilaksanakan.

LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2024 disusun berdasarkan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung tahun 2021-2026. Dengan disusunnya LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung, dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari kelompok indikator masing – masing urusan yang menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung yaitu urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik dan urusan Persandian.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung tahun 2024, terdapat 3 (Tiga) sasaran serta 6 (Enam) indikator yang dievaluasi dan dianalisis pencapaian kinerjanya untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab – sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan berdasarkan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung tahun 2021-2026.

3.1. Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung

Pengukuran capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi tahun 2023, realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun lalu dengan tahun sekarang, serta target dan realisasi sesuai dengan target jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2021-2026, berikut dapat dilihat pada tabel 3.1, table 3.2 dan table 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2024		CAPAIAN KINERJA
					TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terwujudnya Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik mendukung Kabupaten Badung menuju smart city	1 Indeks SPBE	1 Meningkatnya tatakelola pemerintahan serta kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi	1 Persentase aplikasi pemerintahan yang terintegrasi	60 %	72 %	120 %
				2 Persentase lokasi yang terkoneksi jaringan intranet/internet di Kabupaten Badung	-	-	100 % (terealisasi ditahun 2023)
				3 Indeks keterbukaan informasi publik	80 Nilai	98,67 Nilai	123,34 %
				4 Persentase Kelompok KIM yang melaksanakan diseminasi informasi kebijakan dan Program Prioritas Nasional dan Prioritas Daerah	89 %	95 %	106 %
			2 Meningkatnya tata kelola persandian untuk menjaga kerahasiaan serta keamanan informasi dan komunikasi di lingkungan pemerintah daerah	5 Persentase informasi daerah yang terjaga kerahasiaan dan keamanannya sesuai perundang - undangan	100 %	100 %	100 %
			3 Tersedianya data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	6 Persentase data statistik sektoral Kabupaten Badung yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah dalam melakukan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	100 %	100 %	100 %

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Serta Target dan Realisasi Jangka Menengah
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung 2021-2026

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2022		2023		2024		2025		2026	
					T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Terwujudnya Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik mendukung Kabupaten Badung menuju smart city	1 Indeks SPBE	1 Meningkatkan tatakelola pemerintahan serta kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi	1 Persentase aplikasi pemerintahan yang terintegrasi	20 %	24 %	40 %	48 %	60 %	72 %	80 %	-	100 %	-
				2 Persentase lokasi yang terkoneksi jaringan intranet/internet di Kabupaten Badung	-	-	100 %	100 %	-	-	-	-	-	-
				3 Indeks keterbukaan informasi publik	80 Nilai	93,70 Nilai	80 Nilai	93,32 Nilai	80 Nilai	98,67 Nilai	80 Nilai	-	80 Nilai	-
				4 Persentase Kelompok KIM yang melaksanakan diseminasi informasi kebijakan dan Program Prioritas Nasional dan Prioritas Daerah	79 %	79 %	84 %	89 %	89 %	95 %	95 %	-	100 %	-
			2 Meningkatkan tata kelola persandian untuk menjaga kerahasiaan serta keamanan informasi dan komunikasi di lingkungan pemerintah daerah	5 Persentase informasi daerah yang terjaga kerahasiaan dan keamanannya sesuai perundang - undangan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-	100 %	-

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR SASARAN		2022		2023		2024		2025		2026	
							T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
1	2	3		4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				3 Tersedianya data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	6 Persentase data statistik sektoral Kabupaten Badung yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah dalam melakukan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-	100 %	-

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Agar dapat menginterpretasikan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, diperlukan analisis terhadap hasil pengukuran pencapaian tujuan yang dijabarkan dalam keberhasilan dari sasaran berdasarkan indikator kinerja yang mendukung. Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan, berupa dokumen Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung tahun 2021 – 2026.

Sehingga analisis atas capaian kinerja ini menyajikan capaian tujuan yang ingin dicapai sesuai yang diperjanjikan melalui Perjanjian kinerja 2024 sesuai hasil pengukuran kinerja dengan rencana akhir yang ingin dicapai berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024. Hasil analisis tujuan, sasaran dan indikator sasaran urusan komunikasi dan informatika secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1: Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Serta Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi

Sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), SPBE diperlukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, serta berkualitas dan terpercaya. Penerapan SPBE diharapkan dapat meningkatkan penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses manajemen pemerintah. Tidak hanya dalam pemberian pelayanan publik kepada masyarakat, namun juga tata kelola internal didalam pemerintahan. Agar efektif, efisien, dan kinerja pemerintahan meningkat. Pada Sasaran 1 yaitu Meningkatnya tatakelola pemerintahan serta kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi terdiri dari 4 (Empat) alat ukur yaitu indikator Persentase aplikasi pemerintahan yang terintegrasi, Persentase lokasi yang terkoneksi jaringan intranet/internet di Kabupaten Badung, Indeks keterbukaan informasi publik, Persentase Kelompok KIM yang melaksanakan diseminasi informasi kebijakan

dan Program Prioritas Nasional dan Prioritas Daerah. Untuk pencapaian keempat indikator ini, dapat dijelaskan pada pengukuran dan analisis sebagaimana pada tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.3
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Serta Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN		2023		2024		% Target Kinerja 2024
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
1	2	3		4	5	6	7	8
1	Meningkatnya tatakelola pemerintahan serta kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi	1	Persentase aplikasi pemerintahan yang terintegrasi	40	48	60	72	120
		2	Persentase lokasi yang terkoneksi jaringan intranet/internet di Kabupaten Badung	100	100	-	-	100 (terealisasi ditahun 2023)
		3	Indeks keterbukaan informasi publik	80	93,32	80	98,67	116,65
		4	Persentase Kelompok KIM yang melaksanakan diseminasi informasi kebijakan dan Program Prioritas Nasional dan Prioritas Daerah	84	89	89	95	106

- **Indikator 1 :
Persentase Aplikasi Pemerintahan Yang Terintegrasi**

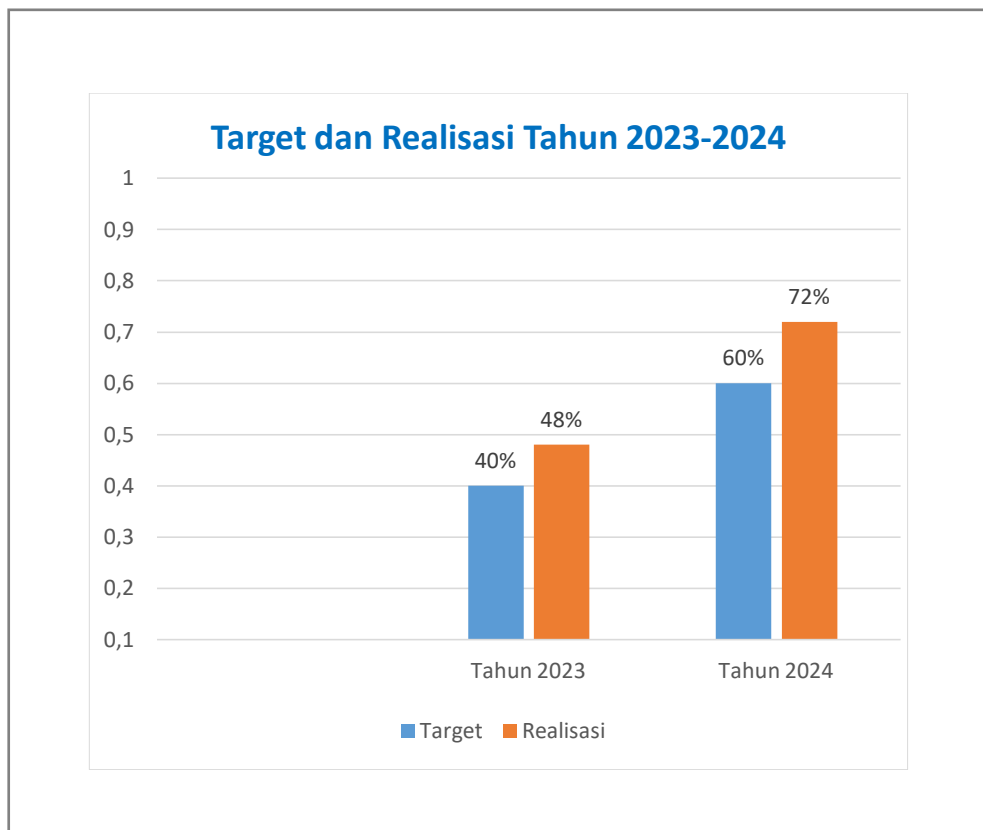


Pemerintahan elektronik atau e-government adalah pemakaian atau penggunaan teknologi informasi yang meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan pihak-pihak lain. Atau definisi e-government yang lainnya adalah merupakan kependekan dari “elektronik pemerintah”, dapat dikenal e-gov, pemerintah digital, online pemerintah ataupun pemerintah transformasi dalam penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis serta hal - hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. Tujuannya dan fungsi E-Government yaitu meningkatkan mutu layanan publik, dengan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan juga komunikasi dalam proses penyelenggaraan pemerintah daerah supaya dapat terbentuk pemerintahan yang bersih, transparan, dan juga supaya dapat menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Keuntungan yang paling diharapkan dari e-Government adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik.

Untuk meningkatkan kualitas Sistem informasi dalam mendukung perbaikan kualitas pelayanan publik Dinas Komunikasi dan Informatika untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) dan RENSTRA 2021-2026 menargetkan membangun dan mengintegrasikan aplikasi sebanyak 15 aplikasi atau sama dengan 100% selama 5 (Lima) tahun dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2026, dimana akan membangun dan mengintegrasikan 5 aplikasi pada setiap tahunnya atau sama dengan 20%. Jadi target selama 5 tahun diakumulasi dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2026. Persentase aplikasi pemerintahan yang terintegrasi berdasarkan tabel 3.3 di atas, dapat diketahui tahun 2024 target aplikasi yang terbangun dan terintegrasi sebesar 60 % dan terealisasi sebesar 72 % telah terbangun dan terintegrasi sebanyak 18 aplikasi di tahun 2024, dengan capaian kinerja sebesar 120%. Dengan demikian target sampai akhir periode Tahun

anggaran 2024 dapat tercapai dengan baik bahkan melebihi target yg ditetapkan. Perbandingan target dan realisasi indikator Persentase Aplikasi Pemerintahan Yang Terintegrasi tahun 2023 - 2024 seperti pada grafik 3.1 berikut :

Grafik 3.1
Target Dan Realisasi Indikator Kinerja
Persentase Aplikasi Pemerintahan Yang Terintegrasi



Dari grafik diatas dapat dilihat, Pada tahun 2023 adanya peningkatan dari target yg ditetapkan sebesar 40 % atau sama dengan 10 Aplikasi yang terbangun dan terintegrasi, Dengan realisasi sebesar 48 % atau sama dengan 12 Aplikasi yang terbangun dan terintegrasi. Dengan capaian kinerja sebesar 120% Dan pada tahun 2024 adanya peningkatan dari target yg ditetapkan sebesar 60 % atau sama dengan 15 Aplikasi yang terbangun dan terintegrasi, dimana target tersebut merupakan akumulasi dari target 2022 dan 2024. Dengan realisasi sebesar 72 %

atau sama dengan 18 Aplikasi yang terbangun dan terintegrasi. Dengan capaian kinerja sebesar 120%. Adapun faktor pendukung sehingga capaian melebihi target karena Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta kemampuan Sumser Daya Manusia (SDM) dalam bidang TIK. Daftar aplikasi pemerintahan yang terbangun dan terintegrasi tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut :

Tabel 3.4
Daftar Aplikasi Pemerintahan Yang Terbagun Dan Terintegrasi
Tahun 2022 - 2024

No	Nama Aplikasi	Triwulan	Tahun	Keterangan
1.	Aplikasi Kinerja & TPP	Triwulan I	2022	BKPSDM
2.	Aplikasi E-SAKIP	Triwulan II	2022	Bagian Organisasi
3.	Aplikasi PPDB 2022	Triwulan III	2022	Disdikpora
4.	Aplikasi Penghubung v1	Triwulan III	2022	Diskominfo
5.	Aplikasi Badung Satu Data	Triwulan IV	2022	BAPPEDA
6.	Bang Goni v1	Triwulan IV	2022	Dinas Pertanian dan Pangan
7.	SIDALOK (SKT Online)	Triwulan I	2023	Seluruh OPD
8.	PPBD 2023	Triwulan II	2023	Disdikpora
9.	e-HIBAH 2023	Triwulan III	2023	Bagian Kesra
10.	SIKAP Badung (TPP dan Absensi Mobile)	Triwulan III	2023	BKPSDM
11.	Layanan Desa Digital	Triwulan IV	2023	Desa
12.	Pengelolaan Menara/Tuwer	Triwulan IV	2023	Diskominfo
13.	Mail Server Kabupaten Badung	Triwulan I	2024	Diskominfo
14.	Sidumas Whistle Blowing	Triwulan II	2024	Inspektorat

15.	Sistem SIMPANLAWAS	Triwulan III	2024	Inspektorat
16.	istem Evaluasi SPBE	Triwulan III	2024	Diskominfo
17.	Sistem IT-Support	Triwulan IV	2024	Diskominfo
18.	Badung Satu Data V2	Triwulan IV	2024	Diskominfo

Indikator kinerja Persentase aplikasi pemerintahan yang terintegrasi di dukung 1 (Satu) program utama yaitu Program Aplikasi Informatika dan 1 (Satu) program pendukung yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Dan 1 (Satu) kegiatan serta 4 (Empat) Sub Kegiatan dengan pagu anggaran **Rp. 2.690.911.850 ,-** realisasi anggaran **Rp. 2.098.313.940 ,-** atau sama dengan **78%**. Dari perbandingan pagu anggaran dengan realisasi anggaran terjadi efisiensi anggaran sebesar **Rp. 592.597.910 ,-** efisiensi ini akibat adanya selisih antara harga penawaran oleh penyedia terhadap pagu anggaran yang tersedia.

• **Indikator 2 :
Persentase lokasi yang terkoneksi jaringan intranet/internet di Kabupaten Ba**



Indikator persentase lokasi yang terkoneksi jaringan intranet/internet di Kabupaten Badung sudah tercapai ditahun 2023 dengan 988 lokasi yang terkoneksi jaringan intranet/internet dengan target capaian kinerja 100% yang didukung oleh 1 (satu) program dan 1 (Satu) kegiatan serta 3 (Tiga) Sub Kegiatan yaitu Program Pengelolaan Aplikasi dan Informatika dengan pagu anggaran di tahun 2024 sebesar **Rp. 69.314.546.914,-** dengan realisasi **Rp. 39.199.945.415 ,-**. Atau sama dengan **57 %**. Dari perbandingan pagu anggaran dengan realisasi anggaran terjadi efisiensi anggaran sebesar **Rp. 30.114.601.499,-** yang digunakan sebagai belanja pemeliharaan jaringan internet/intranet.

- **Indikator 3 :
Indeks keterbukaan Informasi Publik**



Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan bahan publik yang berakibat pada kepentingan publik. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan pemerintah tersebut maka makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Indikator indeks keterbukaan informasi publik terkait dengan Monitoring dan Evaluasi dari Komisi Informasi provinsi Bali yang diselenggarakan setiap tahun.

Sesuai Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik bagi masyarakat luas yang berkaitan dengan Badan Publik. Kabupaten Badung telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Keputusan Bupati Badung Nomor 1939/01/HK/2011 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Badung terakhir diperbaharui dengan Keputusan Bupati Badung Nomor 113/049/HK/2022 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Kabupaten Badung. PPID Kabupaten Badung secara *Ex-officio* dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung dan memiliki 113 PPID Pelaksana pada Perangkat Daerah, Kelurahan, Desa dan Perusahaan Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Badung. PLID Kabupaten Badung beralamat di Gedung Badung Command center, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung.

Sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan Kinerja Badan Publik maka Komisi Informasi Provinsi Bali secara rutin melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik, melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024. PPID Kabupaten Badung yang dijabat

oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung pada Tahun 2024 telah mendapatakn predikat **Informatif** dengan nilai indeks Keterbukaan Informasi Publik 98,67 serta mendapatkan penghargaan **Praja Anindita mahottama** yaitu pemerintahan yg terbuka. Dimana target yang di tetapkan tahun 2022 yaitu nilai indeks sebesar 80. Dengan demikian PPID Kabupaten Badung mengalami peningkatan pencapaian sebesar nilai indeks sebesar 123,34 %.

Tabel 3.5
Perbandingan Nilai Index Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 dengan Kabupaten Gianyar

PPID Kabupaten Badung	PPID Kabupaten Gianyar
Capaian Target Tahun 2024	Capaian Target Tahun 2024
98,67	94.01

Dari tabel 3.5 di atas dapat dilihat, Nilai Index Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Badung tahun 2024 sebesar 98,67 dibandingkan dengan Nilai Index Keterbukaan Informasi Publik kabupaten Gianyar sebesar 94.01. Capaian ini disebabkan karena faktor pendukung pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta kemampuan Sumser Daya Manusia dalam penerapan Keterbukaan Informasi Publik.

Indikator indeks keterbukaan informasi publik didukung oleh 1 (Satu) Program, 1 (Satu) Kegiatan dan 3 (Tiga) Sub Kegiatan yaitu Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik, dengan pagu anggaran sebesar **Rp. 8.634.235.643,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 7.374.303.200 ,-** atau sama dengan **85%**. Dari perbandingan pagu anggaran dengan realisasi anggaran terjadi efisiensi anggaran sebesar **Rp. 1.259.932.443,-** akibat adanya penawaran harga dari item belanja oleh penyedia.

• **Indikator 4 :
Persentase Kelompok KIM yang melaksanakan diseminasi informasi kebijakan
dan Program Prioritas Nasional dan Prioritas Daerah**



Upaya pemberdayaan kehidupan masyarakat Kabupaten Badung di era globalisasi dimana persaingan semakin terbuka di dalam dan di luar negeri. Upaya pemberdayaan antara lain dilakukan dengan mendorong kelompok - kelompok masyarakat untuk mendayagunakan teknologi didalam penyebaran informasi agar memberikan nilai tambah bagi kehidupan masyarakat. Proses pemberdayaan terjadi melalui peningkatan kesadaran akan pentingnya informasi, peningkatan akses dan pendayagunaan melalui kelompok KIM.

Kelompok Komunikasi Informasi Masyarakat (KKIM) adalah kelompok yang dibentuk oleh, dari, untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah. Di Kabuapten Badung awal pembentukan Kelompok KIM di setiap Kecamatan dengan menunjuk Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27/PER/M.KOMINFO/12/11 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten / Kota.

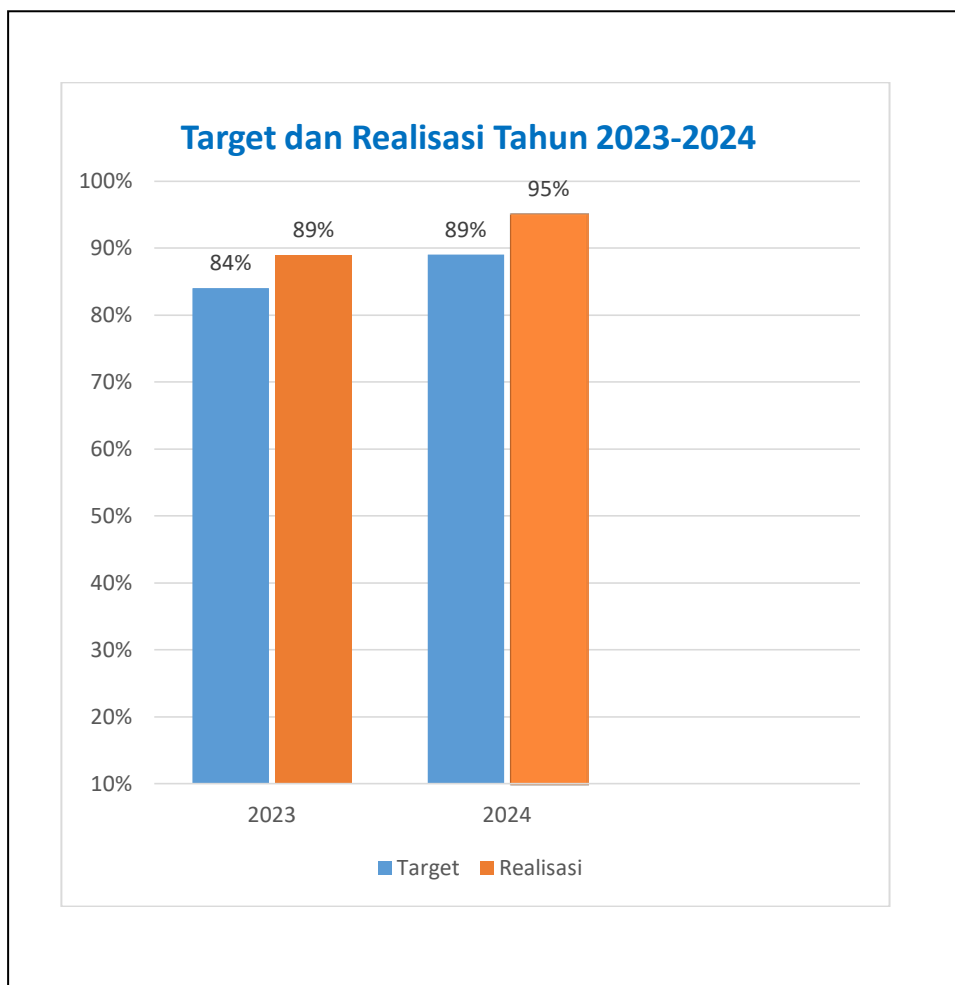
Dengan adanya kebijakan Bupati Badung dengan berdasarkan Permen. Kominfo nomor 8/Per/M/Kominfo/6/2010 terbit Surat Edaran Bupati Badung Nomor 411.6/758/DISKOMINFO/SEKRET yang meminta setiap Desa/Kelurahan untuk membentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) mengakibatkan adanya peningkatan yang cukup tinggi pembentukan Kelompok KIM yang tersebar di Desa/ Kelurahan yang sehingga melebihi target yang ditetapkan dalam indikator Persentase Kelompok KIM yang melaksanakan diseminasi informasi kebijakan dan Program Prioritas Nasional dan Prioritas Daerah seperti yang tercantum di dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2021 – 2026. Pembentukan dan pembinaan Kelompok KIM yang melaksanakan diseminasi

informasi kebijakan dan Program Prioritas Nasional dan Prioritas Daerah pada setiap tahun sebanyak 3 Kelompok KIM dengan berkesinambungan selama 5 Tahun kedepan sesuai target Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026. Dengan Pembentukan dan pembinaan Kelompok KIM yang melaksanakan diseminasi informasi kebijakan dan Program Prioritas Nasional dan Prioritas Daerah diharapkan mampu meneruskan dan menginformasikan program – program nasional maupun daerah kepada seluruh masyarakat.

Tahun 2024 target Persentase Kelompok KIM yang melaksanakan diseminasi informasi kebijakan dan Program Prioritas Nasional dan Prioritas Daerah sebesar 89 % (51 kelompok KIM), dengan realisasi sebesar 95% (54 Kelompok KIM) yang mengalami peningkatan sebesar 5 % atau (3 Kelompok KIM), dengan capaian kinerja sebesar 106%. Di bandingkan dengan tahun 2023 capaian kinerja Kelompok KIM yang melaksanakan diseminasi informasi kebijakan dan Program Prioritas Nasional dan Prioritas Daerah sebesar 89% (51 Kelompok KIM) yang mengalami peningkatan sebesar 5% (3 Kelompok KIM), dengan capaian kinerja sebesar 106%. Dengan perbandingan tersebut terjadi peningkatan capaian kinerja sebesar 6%. Adapun faktor pendukung sehingga tercapainya target indikator Persentase Kelompok KIM yang melaksanakan diseminasi informasi kebijakan dan Program Prioritas Nasional dan Prioritas Daerah yaitu dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta kemampuan Sumser Daya Manusia yang dimiliki. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik 3.2 dibawah ini :

Grafik 3.2

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Kelompok KIM yang melaksanakan diseminasi informasi kebijakan dan Program Prioritas Nasional dan Prioritas Daerah Tahun 2023 – 2024



Tabel 3.6

Daftar Desa/Kelurahan di Kecamatan yang telah membentuk Kelompok KIM tahun 2017 s/d 2024

No	Nama KIM	Alamat	Nama Pengurus			Jumlah Anggota	Ket
			Ketua	Sekretaris	Bendahara		
A. KECAMATAN PETANG							
1	KIM Plagaku	Desa Plaga	I Putu Sukadana,S,Pd	I Putu Edy Putrawan,S.Pd	I Gede Apel Adi Kertayasa,Sos	15 org	2017
2	KIM Bhuana Multi Media Karang Taruna Catur Bhuana	Desa Pangsan	I Gusti Ngurah Suryadipa Pinatih	I Gusti Ngurah Aditya Dwiyanto	I Gusti Ngurah Budi Triatmajaya	8 org	2017
3	KIM Belok Sidan	Desa Belok Sidan	I Made Sukariadi	I Wayan Agus Hernawan	Ni Putu Kristiani	24 org	2018
4	KIM Desa Petang	Desa Petang	I Gede Yana Indrawan	Ni Luh Made Ari Istani, Amd. Kep.		26 org	2018
5	KIM Desa Carang Sari	Desa Carang Sari	I Wayan Sastrawan	I Made Yoga Antara	I Putu Agus Mahendra	29 org	2019
6	KIM Desa Sulangai	Desa Sulangai	I Putu Hery Indrawan	I Made Dian Priadia	I Made Dwi Saputra	13 org	2020
7	KIM Desa Pangsan	Desa Pangsan	I Gusti Ngr Agung Sandy Warmana,S.Pd.H	Kadek Widiastuti,S.Pd.H.,MPD	Ni Putu Harta Diani,SSI	26 org	2022
8	KIM Desa Getasan	Desa Getasan	I Gusti Bagus Indrawan	Ni Kadek Dian Pratiwi	Ni Kertut Kessy Indira Maheswari	27 org	2023
B. KECAMATAN ABIANSEMAL							
9	KIM Sekaa Udayana-Net	Desa Taman	I Made Suparno	Ni Putu Rilita Ari, S.Kom	I Nyoman Budiasa	26 org	2017
10	KIM Setya Nugraha	Desa Jagapati	I Made Sdiantara	Ni Luh Dewiyanti	I Gede Agus Arista,SE	4 org	2017

11	KIM Desa Abiansemal	Desa Abiansemal	I Wayan Wikanjaya	I Nyoman Suartawan		11 org	2018
12	KIM Desa Blahkiuh	Desa Blahkiuh	I Gst Ngr Aan Darmawan	I Wayan Mahardika	I Ketut Harsapala	19 org	2018
13	KIM Desa Mambal	Desa Mambal	I Wayan Windhu Satin	I Made Adi Sanjaya	I Wayan Edik Parabita	13 org	2018
14	KIM Desa Punggul	Desa Punggul	I Gusti Ngr Lanang Oka, ST	Agus Ekayana	I Nyoman Carta	16 org	2018
15	KIM Desa Sangeh	Desa Sangeh	I Putu Yudana	Ni Luh Gede Radeti	I Nyoman Suedana	4 org	2018
16	KIM Desa Sedang	Desa Sedang	I Gusti Ngurah Bagus Yudistira	Ni Luh Santiari		22 org	2018
17	KIM Desa Selat	Desa Selat	I Made Narta	Putu Indah Noviani		12 org	2018
18	KIM Desa Sibanggede	Desa Sibanggede	I Wayan Priyadi	Ni Ketut Aryani	Kadek Aryanti	16 org	2018
19	KIM Desa Bongkasa	Desa Bongkasa	I Putu Arik Astawan	I Gusti Agung Novi Permani	Ni Luh Rosita Dewi	14 org	2018
20	KIM Desa Mekar Bhuwana	Desa Mekar Bhuwana	I Putu Gede Budi Sustrisno	Ni Made Dewi Santina	Ni Made Ayu Julia Astari	19 org	2018
21	KIM Sibang Kaja	Sibang kaja	I Putu Putra, S.H	Gede Widana			2021
22	KIM Dauh Yeh Cani	Dauh Yeh Cani	Sekertaris Desa Abiansemal Dauh Yeh Cani	Kepala seksi Pemerintahan Abiansemal Dauh Yeh Cani	Ni Nyoman Nuriati	12 org	2021
23	KIM Desa Ayunan	Desa Ayunan	I Putu Alit Nadiana, S. Kom	I Ketut Artana	Ni Luh Sintia Damayanti	4 org	2021
24	KIM Desa Darmasaba	Desa Darmasaba	I Wayan Sudana	Ni Putu Regina Candra Dewi Maharani	Ni Wayan Prema Yani	25 org	2022
C. KECAMATAN MENGWI							
25	KIM Karang Taruna Tanjung Mekar Sari	Mengwitani 1	I Made Widiantera	I Putu Gede Sudarmanta, SE	I Putu Arik Budiastara, SH	12 org	2017
26	KIM Hanoman Web	Kelurahan Sempidi	Ni Made Suwendri, SH	I Made Suardhita	I Made Culistyanti	12 org	2017

27	KIM Braya Empas	Mengwitani 2	I Made Sukaawan	I Wayan Miskin	I Made Rai Joni Artha, SH	7 org	2017
28	KIM Desa Buduk	Desa Buduk	I Made Selamat Wiyasa	I Kadek Ari Yuliana	I Kadek Agus Surya Pramana	5 org	2018
29	KIM Desa Cemagi	Desa Cemagi	I Putu Ari Ratna Pratama, S.Kom	I Made Prasetya Widiana, ST	I Putu Adi Mahardika	18 org	2018
30	KIM Desa Kekeran	Desa Kekeran	Putu Elma Mira Kusmarini	I Made Rai Mardika Kusuma	I Made Jaya Suyasa	23 org	2018
31	KIM Desa Mengwi	Desa Mengwi	I Made Dwi Merta Yoga	Ni Putu Gita Rahayu	Ni Putu Eka Maryuni	11 org	2018
32	KIM Desa Munggu	Desa Munggu	I Putu Deny Rismawan, S.Sos	I Gede Yoga Pratama	Ni Putu Griyani Antari	17 org	2018
33	KIM Desa Penarungan	Desa Penarungan	Made Suka Setiawan, S.Kom	Ni Ketut Nuryatini, S.E	Gek Ayu Sudaryanthi	15 org	2018
34	KIM Desa Werdi Bhuwana	Desa Werdi Bhuwana	I Wayan Andre Sutirta Yasa	Ni Desa Nyoman Sri Utari	Ni Wayan Karyati	20 org	2018
35	KIM Desa Kapal	Kelurahan Kapal	Ni Rai Ida Yuliani, S.sos	Ayu Sriani	Ni Made Warsiki	4 Orang	2020
36	KIM Desa Abianbase	Kelurahan Abianbase	I Made Sudarta, S.H	I Dewa Nyoman Sudirta, S.Sos	Ni Putu Ratih Martini, S.E	30 org	2022
37	KIM Desa Baha	Desa Baha	I Made Sumantra			4 org	2021
38	KIM Desa Sembung	Desa Sembung	I Nyoman Wardana	I Gusti Agung Ngurah Wirawan	I Gusti Agung Ayu Widiastuti. SS	24 org	2024
39	KIM Desa Kuwum	Desa Kuwum					2024
40	KIM Desa Sobangan	Desa Sobangan					2024
D. KECAMATAN KUTA UTARA							
41	KIM Desa Cangu	Desa Cangu	I Nengah Sutarna	Ni Luh Desi Natalia	Ni Luh Putri Widianti	8 org	2017
42	KIM Desa Tibubeneng	Desa Tibubeneng	Ni Luh Intan Duarawati	I Gede Oka Putra Suartika	I Gede Doni Dinata	9 org	2018

43	KIM Desa Dalung	Desa Dalung	Agus Bayu Pratama Yasa	I Gede Made Okta Saputra	Kadek Hendra Satria Wiguna	24 org	2019
44	KIM Kerobokan Kaja	Kelurahan Kerobokan Kaja	Kasi Pemerintaha	Ketua Karang Taruna	Bendahara Pembantu	21 org	2020
45	KIM Kerobokan	Kelurahan Kerobokan	Ni Nyoman Tringestitiani, S.H	Rai Oka Suarjana, S.T	Ni Made Parwani	15 org	2023
E. KECAMATAN KUTA							
46	KIM SMILE	Lurah Legian	Putu Suryadi	Ni Wayan Helen Winda Utari	Kadek Kardil Yoga	25 org	2017
47	KIM Sewaka Media Tama	Lurah Seminyak	I Made Suwita,SH	I Wayan Suma	I Wayan Adiana	20 org	2017
48	KIM Kelurahan Kedonganan	Lurah Kedonganan	Wayan Sugita,SH	I Gede Putu Tapaginarsa	Ni Ketut Adi Sri Wahyuni	6 org	2020
F. KECAMATAN KUTA SELATAN							
49	KIM Kemdes Kutuh	Desa Kutuh	I Putu Sukardyana	Ni Kadek Subawa Artana	Putu Pitriani	10 org	2017
50	KIM Repiter Maruti	Desa Unggasan	I Wayan Kena	Gusti Wayan Suka Widhiana, SE	I Wayan Nana	40 org	2017
51	KIM Desa Pecatu	Desa Pecatu	I Wayan Sinom S.Sos,M Ap	Ni Putu Wika Yusita Lestari, A.Md	Ni Luh Gede Ditarini Rahayu, SE	24 org	2019
52	KIM Kelurahan Benoa	Desa Benoa	Ir. I Gede Eka Surawan, S.T. MAP.	Ni Wayan Rina	Ni Putu Manik Cahyani	15 org	2022
23	KIM Kelurahan Tanjung Benoa	Desa Tanjung Benoa	I Dewa Made Diana	I Ketut Alit Sudiatma	I Made Gelgel	5 org	2019
54	KIM Jimbaran	Kelurahan Jimbaran					2023

Dari tabel 3.6 diatas, sebanyak 54 Kelompok KIM diatas sudah Melaksanakan diseminasi informasi kebijakan dan Program Prioritas Nasional dan Prioritas Daerah seperti :

- Kegiatan percepatan penanggulangan stunting (Dinas Kesehatan)
- Kegiatan duta tenaga statistik (BPS)
- Kegiatan tenaga regsoseg (BPS)
- Kegiatan BIMTEK PILKADA dari KPU dalam rangka Mensukses PILKADA serentak (KPU)
- Kegiatan penghitungan suara PILKEL yang transparansi melalui KANAL (DPMD)
- Kegiatan BIMTEK dari KEMENKOMINFO RI tentang Kebijakan dan Strategi Teknologi Informasi dan Komunikasi

Indikator Persentase Kelompok KIM yang melaksanakan diseminasi informasi kebijakan dan Program Prioritas Nasional dan Prioritas Daerah didukung oleh 1 (Satu) Program, 1 (Satu) Kegiatan dan 5 (Lima) Sub Kegiatan yaitu Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik, dengan pagu anggaran sebesar **Rp. 299.818.567 ,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 256.564.480 ,-** atau sama dengan **86 %**. Dari perbandingan pagu anggaran dengan realisasi anggaran terjadi efisiensi anggaran sebesar **Rp. 43.254.087,-** akibat adanya penawaran harga pada setiap item belanja oleh penyedia.

**Sasaran 2 :
Meningkatnya Tata Kelola Persandian Untuk Menjaga Kerahasiaan Serta
Keamanan Informasi Dan Komunikasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah**

Persandian merupakan salah satu urusan yang merupakan kewenangan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung, oleh karena itu sasaran ke 2 Dinas Kominfo Sebagai alat ukur capaian kinerja sasaran adalah indikator Prosentase informasi daerah yang terjaga kerahasiaan dan keamanannya sesuai perundang-undangan. Pengelolaan persandian pada Pemerintahan Daerah akan meningkatkan pengamanan informasi dan membantu fungsi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik, terhadap ancaman berupa interupsi, intersepsi, modifikasi, serta fabrikasi data dan informasi. Pengaturan persandian di Pemda diantaranya mengatur masalah tata kelola persandian, koordinasi persandian, penetapan informasi berklasifikasi, standar pengamanan system dan jaring komunikasi sandi, serta kualifikasi SDM sandi.

Capaian kinerja sasaran pendukung sasaran ini, dapat dijelaskan pada pengukuran dan analisis sebagaimana pada tabel 3.7 berikut :

Tabel 3.7
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya Tata kelola Persandian Untuk Menjaga Kerahasiaan Serta
Keamanan Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah

No	Indikator Sasaran	Tahun 2023		Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Prosentase informasi daerah yang terjaga kerahasiaan dan keamanannya sesuai perundang-undangan	100	100	100	100	100

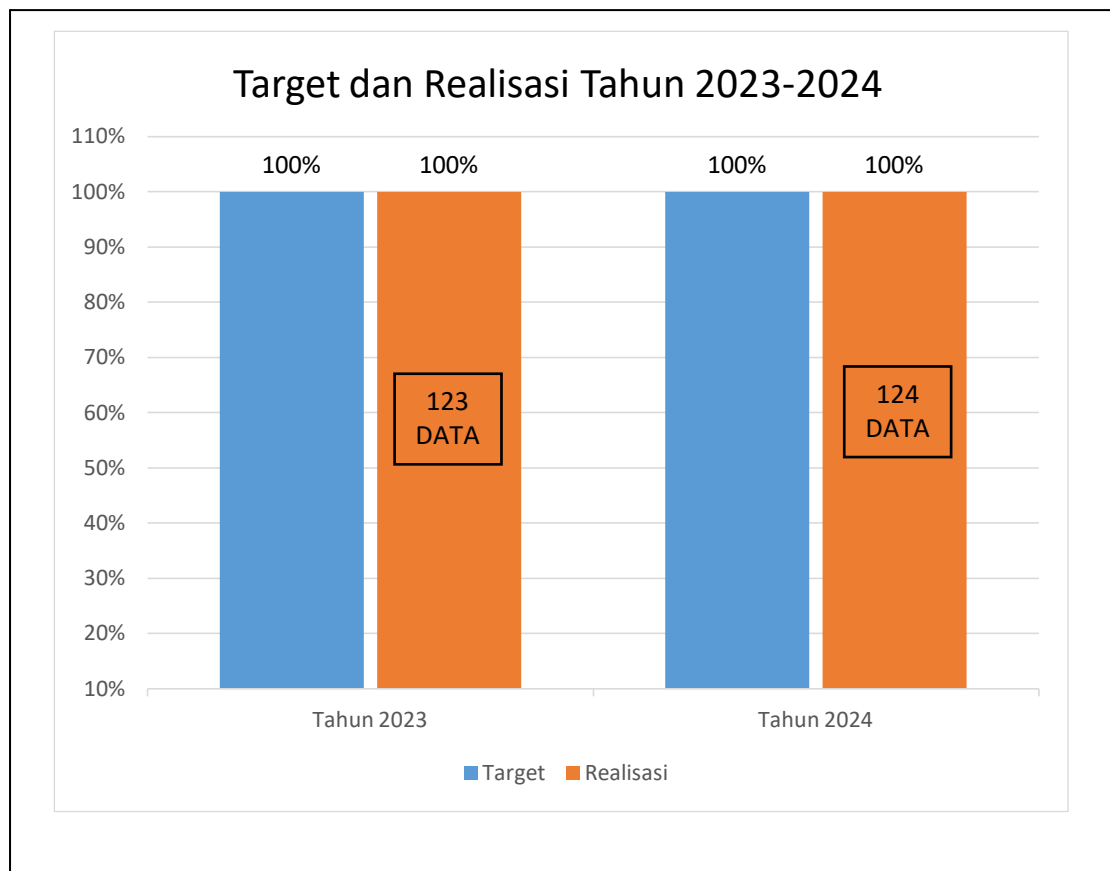
• **Indikator 5 :**
Prosentase Informasi Daerah Yang Terjaga Kerahasiaan Dan Keamanannya Sesuai Perundang - Undangan



Berdasarkan Peraturan Bupati Badung Nomor 19 Tahun 2020, tentang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung melalui Bidang Persandian menyelenggarakan urusan persandian menyangkut pengamanan informasi publik; bukan hanya jaminan keamanan terhadap aspek kerahasiaan tetapi terhadap aspek keutuhan, keotentikan dan nir penyangkalan; pelayanan kepada pimpinan daerah dan perangkat daerah termasuk staf; pengamanan bukan hanya di kamar sandi; tetapi juga mendukung pengamanan TIK; kolaborasi dengan sistem keamanan informasi. Dalam mewujudkan keamanan informasi Bidang Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung bekerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Republik Indonesia dalam menerapkan Sertifikat Elektronik dalam mendukung penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Badung Nomor 98/049/HK/2020, tentang Penetapan Pelaksana Kegiatan Sertifikat Elektronik, tanggal 30 Maret 2020, Tahun 2020. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung melalui Bidang Persandian menerapkan Sertifikat Elektronik untuk melindungi keamanan informasi khususnya aspek otentikasi dan keutuhan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau Sistem Elektronik serta dokumen elektronik di Pemerintah Daerah. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik (TTE) dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau Sistem Elektronik telah diterapkan dengan Sertifikat Elektronik dan tersedianya Tanda Tangan Elektronik (TTE) yang tersertifikasi untuk melindungi dokumen elektronik.

Tahun 2024 Pejabat yang sudah menerapkan Tanda Tangan Elektronik (TTE) dilingkungan Kabupaten Badung dengan difasilitasi oleh bidang persandian Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Badung sebanyak 124 (Seratus Dua Puluh Empat) yaitu 37 (Tiga puluh tujuh) Kepala Perangkat Daerah 12 (Dua Belas) Kepala bagian pada Sekretariat Daerah, 1 (satu) Kepala Rumah Sakit Mangusada, 16 (Enam belas) Kelurahan dan 46 (Empat puluh enam) Desa, serta 12 (Dua belas) UPTD.Puskesmas. Dibandingkan dengan tahun 2023 Pejabat yang menerapkan Tanda Tangan Elektronik (TTE) dilingkungan Kabupaten Badung dengan difasilitasi oleh bidang persandian Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Badung sebanyak 123 (Seratus Dua Puluh Tiga) yaitu 38 (Tiga puluh Delapan) Kepala Perangkat Daerah 11 (sebelas) Kepala bagian pada Sekretariat Daerah, 16 (Enam belas) Kelurahan dan 46 (Empat puluh enam) Desa, serta 12 (Dua belas) UPTD.Puskesmas. Dikarenakan adanya penambahan 1 Kepala Bagian Disekretariat Daerah di Tahun 2024. Dengan demikian capaian kinerja sebesar 100%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Grafik 3.3 dibawah ini:

Grafik 3.3
Prosentase Informasi Daerah yang Terjaga Kerahasiaan dan Keamanannya
sesuai Perundang-Undangan



Faktor pendukung sehingga tercapainya target pada indikator prosentase informasi daerah yang terjaga kerahasiaan dan pengamanannya sesuai perundang – undangan ini yaitu pemanfaatan kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Sumser Daya Manusia yang memadai. Adapun program yang menunjang tercapainya capaian kinerja sasaran adalah Program Pengelolaan Persandian Daerah dengan Pagu anggaran sebesar **Rp. 13.855.551,-** terealisasi **Rp. 10.990.680,-** atau sama dengan **79 %**. Dari perbandingan pagu anggaran dengan realisasi anggaran terjadi efisiensi anggaran sebesar **Rp. 2.864.871,-** akibat adanya penawaran harga pada setiap aitem belanja oleh penyedia.

**Sasaran 3 :
Tersedianya Data Statistik Sektoral Dalam Perencanaan Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah**

Sasaran 3 yaitu Tersedianya Data Statistik Sektoral Dalam Perencanaan Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, sasaran tersebut merupakan sasaran dari salah satu urusan yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Badung yaitu urusan Statistik dengan alat ukur 1 (satu) indikator yaitu persentase data statistik sektoral Kabupaten Badung yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah dalam melakukan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.

Kebijakan mengenai Satu Data Indonesia yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 dilatarbelakangi oleh kebutuhan pemerintah atas data sebagai dasar mewujudkan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan di Indonesia. Landasan hukum tersebut digunakan untuk melakukan perbaikan tata kelola data untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan oleh kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah. Pengaturan Satu Data Indonesia bertujuan untuk memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan sehingga dapat mendorong keterbukaan dan transparansi dalam perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan. Perbaikan tata kelola data memastikan data yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah dapat memenuhi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia, yang terdiri dari: (1) Satu Standar Data, yaitu adanya satu standar yang mengatur metodologi yang meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran, dan satuan dalam data, (2) Satu Metadata, yaitu adanya satu format bagi metadata yang diharuskan melekat pada data. Metadata adalah informasi terstruktur yang berfungsi untuk menjelaskan isi dan sumber data sehingga data mudah untuk ditemukan, digunakan, atau dikelola kembali. (3) Interoperabilitas Data, yaitu kemampuan data untuk dibagi pakaikan dan dipertukarkan antar-sistem dan antar-pengguna. (4) Menggunakan Kode Referensi dan Data Induk yang telah ditetapkan oleh Sekretariat Satu Data Indonesia. Penyelenggaraan Satu Data Indonesia membutuhkan kolaborasi lintas Instansi

Pusat dan Instansi Daerah sebagai langkah strategis dalam mencapai transformasi digital. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas tantangan pembangunan, kebutuhan akan data akurat dan mutakhir menjadi semakin mendesak. Data yang terfragmentasi, tidak seragam, dan sulit diakses menjadi hambatan dalam perumusan kebijakan yang efektif. Kondisi data yang tidak konsisten dan tidak dapat dibandingkan menghambat upaya mencapai keterpaduan informasi yang diperlukan untuk perencanaan pembangunan. Pada tahun 2021 dan 2022 Sekretariat Satu Data Indonesia telah mengadakan Asesmen Penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Pusat dan Provinsi. Berdasarkan hasil evaluasi internal Sekretariat SDI terhadap hasil asesmen dalam kurun waktu dua tahun, maka asesmen tersebut membutuhkan perincian dan perbaikan metodologi untuk menjadi sebuah penilaian Indeks Satu Data Indonesia. Hal ini sebagai bentuk Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia untuk memastikan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia dapat diterapkan secara optimal di Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang dapat memberikan manfaat nyata bagi pembangunan secara berkelanjutan. Penyelenggaraan Satu Data Daerah terdiri atas :

Perencanaan Data, Pengumpulan Data, Pengolahan Data dan Penjaminan Kualitas Data dan yang terakhir Penyebarluasan . Adapun daftar produsen data dapat dilihat pada Tabel 3.8 di bawah ini :

Tabel 3.8
Perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam
menyusun perencanaan pembangunan daerah kabupaten badung
tahun 2024

No	Perangkat Daerah	Jenis Data Statistik Sektoral	Keterangan
1.	Sekretariat DPRD	Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Fraksi dan Jabatan/Komisi di Kabupaten Badung, 2024	
		Jumlah Anggota DPRD Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin	
2.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin Desember 2023 dan Desember 2024	
		Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin Desember 2022, Desember 2023 dan Desember 2024	
		Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Desember 2023 dan Desember 2024	
		Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin Desember 2023 dan Desember 2024	
3.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Badung (rupiah)	
4.	Bagian Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Badung - Bagian Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Badung - Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan , Setda Kabupaten Badung	Banyaknya Usaha Pertambangan Galian C, Tenaga Kerja, dan Volume Produksi menurut Kecamatan di Kabupaten Badung Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal Kab.Badung	
5.	Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Penduduk menurut kecamatan dan agama yang dianut	
		Jumlah Penduduk Laki-Laki(Ribu Jiwa) di Kabupaten Badung.	
		Jumlah Penduduk Perempuan (Ribu Jiwa) di Kabupaten Badung.	

		Sebaran Penduduk Menurut Kepadatan di Kabupaten Badung	
		Persentase Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tidak/Belum pernah sekolah	
		Persentase Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tidak Tamat SD	
		Persentase Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan SD/MI	
		Persentase Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan SMP	
		Persentase Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan SMA	
		Persentase Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Perguruan Tinggi	
6.	Dinas Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Badung,2023	
		Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Badung, 2024	
		Rasio Jumlah Posyandu dan Balita Kabupaten Badung	
		Jumlah Puskesmas Kabupaten Badung	
		Jumlah Polinik Kabupaten Badung	
		Jumlah Pustu Kabupaten Badung	
		Rasio Dokter Per Satuan Penduduk	
		Rasio Tenaga Medis dan Para Medis Per Satuan Penduduk	
		Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kabupaten Badung	
		Komplikasi Produk Administrasi Angka Keberhasilan Pengobatan TBC dalam Program DOTS	
7.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan	Jumlah Koperasi Aktif menurut Kecamatan,2022-2024	
8.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali	Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Atas (SMA) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Badung, 2023/2024 dan 2024/2025	
		Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Badung SD/MTs	

		Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Badung SMP/MTs	
		Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Badung SSMA/MA	
		Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APK) Kabupaten Badung SD/Mi	
		Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APK) Kabupaten Badung SMP/MTs	
		Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APK) Kabupaten Badung SMA/MA/SMK	
		Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APT) Kabupaten Badung SD	
		Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APT) Kabupaten Badung SMP	
		Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APT) Kabupaten Badung SMA	
		Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APS) Kabupaten Badung SD/MI(7-12 th)	
		Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APS) Kabupaten Badung SMP/MTs(13-15 th)	
		Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APS) Kabupaten Badung SD/SMA/SMK	
		Rasio Ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah Kabupaten Badung SD/MI	
		Rasio Ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah Kabupaten Badung SMP/MTs	
		Jumlah guru Jenjang Pendidikan SD/MI Kabupaten Badung	
		Jumlah guru Jenjang Pendidikan SMP/MTS Kabupaten Badung	
		Jumlah guru Jenjang Pendidikan SD/MI Kabupaten Badung	
		Jumlah Murid Jenjang Pendidikan SMP/MTs Kabupaten Badung	
		Jumlah Organisasi Pemuda Kabupaten Badung	
		Jumlah Organisasi Olahraga Kabupaten Badung	
9.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga	Banyaknya Klinik Keluarga Berencana Menurut Kecamatan di Kabupaten	

	Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Badung, 2022-2024	
		Rasio KDRT Menurut Kecamatan di Kabupaten Badung	
		Rata-rata Jumlah Anak per keluarga di Kabupaten Badung	
		Rasio Akseptor KB Kabupaten Badung	
10.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab Badung	Banyaknya Pencari Kerja per Bulan di Kabupaten Badung Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Badung, 2023	
		Banyaknya Pencari Kerja per Bulan di Kabupaten Badung Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Badung, 2024	
11.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Badung	Banyaknya Anggota dan Pengunjung Perpustakaan Daerah Kabupaten Badung, 2023	
12.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung	Volume Produksi Sampah yang Sudah dan Belum Ditangani di Kabupaten Badung, 2023	
		Volume Produksi Sampah yang Sudah dan Belum Ditangani di Kabupaten Badung, 2024	
		Jumlah Volume Sampah yang Ditangani dan Produksi Sampah Kabupaten Badung	
		Persentase Penanganan Sampah (dalam M3/hari) Kabupaten Badung	
		Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk Kabupaten Badung	
13.	Dinas Pariwisata Kabupaten Badung	Banyaknya Jasa Makanan dan Minuman di Kabupaten Badung	
		Jumlah, Kelas dan Jumlah Restoran Kabupaten Badung Jenis Usaha Restoran	
		Jumlah, Kelas dan Jumlah Restoran Kabupaten Badung Jenis Usaha Rumah Makan	
		Jumlah, Kelas dan Jumlah Restoran Kabupaten Badung Jenis Usaha Bar	
		Jenis, Kelas Penginapan/Hotel Kabupaten Badung Hotel Bintang	
		Jenis, Kelas Penginapan/Hotel Kabupaten Badung Hotel Non Bintang	
		Jenis, Kelas Penginapan/Hotel Kabupaten Badung Pondok Wisata	

		Jenis, Kelas Penginapan/Hotel Kabupaten Badung Kondel	
		Jenis, Kelas Penginapan/Hotel Kabupaten Badung Rumah Sewa	
14.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Angka harapan Hidup	
		Bantuan Rumah layak huni	
		Identifikasi Rumah di Lokasi rawan Bencana dan Terkena Relokasi Program Kabupaten	
		Permohonan Rekomendasi Block Plan Perumahan dan pengkaveling	
15.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung	Jumlah Desa, Kelurahan, Banjar, dan Lingkungan di Kabupaten Badung 2023	
		Jumlah Desa, Kelurahan, Banjar, dan Lingkungan di Kabupaten Badung 2024	
		Kelompok Binaan LMP Kabupaten Badung	
		Kelompok Binaan PKK Kabupaten Badung	
16.	Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Badung	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota berupa RPJPD, RPJMD dan RKPD yang ditetapkan	
17.	Dinas Perikanan Kabupaten Badung	Banyaknya Armada Penangkapan Ikan Laut di Kabupaten Badung, 2024	
18.	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung	Jumlah Alih Fungsi Lahan Sawah di Kabupaten Badung per Kecamatan, 2017 - 2024 (Dalam Hektar)	
		Kompilasi Produk Administrasi Jumlah Populasi Ternak	
19.	Dinas Sosial Kabupaten Badung	Banyaknya Organisasi Sosial, Karang Taruna, Lanjut Usia dan Anak Terlantar di Kabupaten Badung	
20.	Dinas Perhubungan Kabupaten Badung	Jumlah Kendaraan Bermotor yang Telah di Uji Baik Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Badung, 2023	
		Rasio Ijin Trolek Kabupaten Badung	
		Persentase Jumlah Uji Kir Angkutan umum Kabupaten Badung	
		Jumlah Pelabuhan Laut Kabupaten Badung	
		Jumlah Pelabuhan Udara Kabupaten Badung	

		Jumlah Pelabuhan Bis Kabupaten Badung	
		Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Kabupaten Badung	
		Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum Kabupaten Badung	
21.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kab. Badung	Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	
		Panjang Jaringan jalan Dalam Kondisi Sedang	
		Panjang Jaringan jalan Dalam Kondisi Rusak	
		Rasio Jaringan Irigasi Kabupaten Badung	
		Efisiensi Dan Efektifitas Pengelolaan Jaringan Irigasi Kabupaten Badung Pasokan Irigasi Per Area	
		Efisiensi Dan Efektifitas Pengelolaan Jaringan Irigasi Kabupaten Badung Pasokan Irigasi Relatif	
		Efisiensi Dan Efektifitas Pengelolaan Jaringan Irigasi Kabupaten Badung Pasok Air Relatif	
		Efisiensi Dan Efektifitas Pengelolaan Jaringan Irigasi Kabupaten Badung Indeks Luar Area	
		Efisiensi Dan Efektifitas Pengelolaan Jaringan Irigasi Kabupaten Badung Rancangan Luas Areal	
		Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintah di Kabupaten Badung (km) 2021-2024	
22.	Dinas Kominfo Dan Informatika Kabupaten Badung	Penyedia Jaringan Komunikasi Kabupaten Badung	
23.	Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kab.Badung	Jumlah Investor Berskala Nasional PMDN/PMA Kab.Badung	
		Jumlah Perencanaan Investasi PMDN/PMA Kab.Badung	
		Jumlah Realisasi Investasi PMDN/PMA Kab.Badung Realisasi	
		Rasio Daya Serap Tenaga kerja Kab.Badung	
		Lama Proses Perijinan Kabupaten Badung	
24.	Badan Riset Dan Inovasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	

	Daerah	Kab.Badung	
25.	Badan Pendapatan Daerah-Pasedahan Agung Kabupaten Badung	Jumlah Jenis Pajak Yang Dikeluarkan	
		Jumlah Jenis Retribusi Yang Di Keluarkan	
		Besarnya Pajak yang Diterima Berdasarkan Sumber Pajak, 2022-2024	
26.	Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Badung	Rasio Jumlah Polisi pamong Praja Per 10.000 Penduduk	
		Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk Kab.Badung	
27.	Dinas Kebudayaan	Nama Desa Adat Dirinci menurut Kecamatan di Kabupaten Badung	
28.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah warga negara yang memperoleh penyelamatan dan evakuasi korban bencana	
29.	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
30.	Inspektorat	Angka harapan Hidup	
		Indeks Survei Penilaian Integritas	
31.	Dinas Kebakaran Dan Penyelamatan	Response time kejadian kebakaran	
		Pos Kebakaran	
		Jumlah Kejadian Kebakaran	
		Relawan Kebakaran	
32.	Kecamatan Kuta Selatan	Profil Kecamatan Kuta Selatan	
33.	Kecamatan Kuta Utara	Profil Kecamatan Kuta Utara	
34.	Kecamatan Kuta	Profil Kecamatan Kuta	
36.	Kecamatan Mengwi	Profil Kecamatan Mengwi	

37.	Kecamatan Abiansemal	Profil Kecamatan Abiansemal	
37.	Kecamatan Petang	Profil Kecamatan Petang	

Keputusan Bupati Badung No 36/051/HK/2024 tentang Pembentukan Forum Satu Data Daerah Kabupaten Badung terdapat 37 Perangkat Daerah yang menggunakan data statistic dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah. Tahun 2024 tersedia sebanyak 131 data statistic sektoral yang dimanfaatkan oleh 37 Perangkat Daerah dalam melakukan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.

Tabel 3.9
Target dan Realisasi Data Statistik Sektoral Kabupaten Badung yang
Dimanfaatkan dalam Melakukan Perencanaan Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah Tahun 2022 - 2024

No	Indikator Sasaran	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Persentase Capaian Kinerja Tahun 2024
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase data statistik sektoral Kabupaten Badung yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah dalam melakukan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%

- **Indikator 6 :**
Persentase Data Statistik Sektoral Kabupaten Badung Yang Dimanfaatkan Oleh Perangkat Daerah Dalam Melakukan Perencanaan Dan Evaluasi Pembangunan Daerah



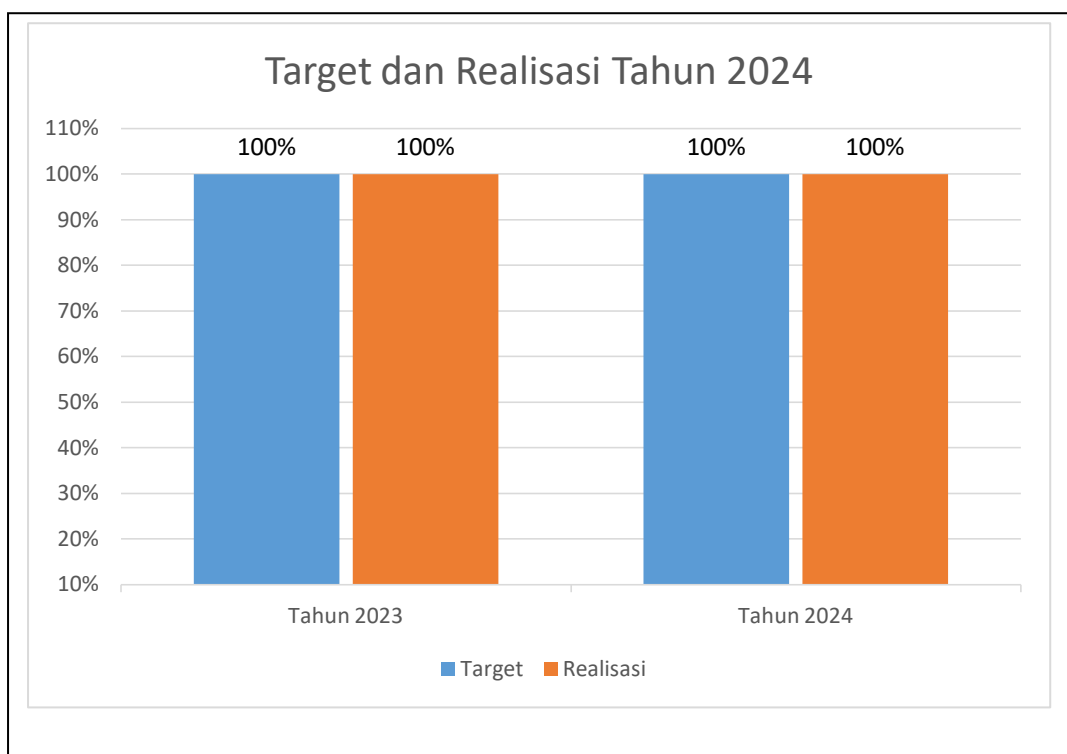
Data Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan. Publikasi data statistik sebagai wujud terselenggaranya pembangunan yang lebih terencana, oleh karenanya ketersediaan data statistik yang andal merupakan salah satu kunci keberhasilan perencanaan. Berdasarkan tabel 3.8 dan tabel 3.9 realisasi Persentase data statistik sektoral Kabupaten Badung yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah dalam melakukan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.

Tahun 2024 terdapat 37 (Tiga Puluh Tujuh) Perangkat Daerah yang menggunakan data statistic dalam menyusun perencanaan pembangunan

daerah. Dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 100% data statistic sektoral dimanfaatkan oleh Perangkat daerah di Kabupaten Badung. Adapun faktor pendukung capaian target karena Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta kemampuan Sumber Daya Manusia. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik 3.4

Grafik 3.4

Target Dan Realisasi Indikator Persentase Data Statistik Sektoral Kabupaten Badung Yang Dimanfaatkan Oleh Perangkat Daerah Dalam Melakukan Perencanaan Dan Evaluasi Pembangunan Daerah



Perogram yang menunjang tercapainya capaian kinerja sasaran Tersedianya Data Statistik Sektoral Dalam Perencanaan Dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah 1 (Satu), 1 Kegiatan dan 3 (Tiga) Sub Kegiatan. Adapun program yang mendukung yaitu Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, dengan pagu anggaran **Rp. 79.759.415 ,-** terealisasi **Rp 70.305.100 ,.** atau sama dengan **88 %**. Dari perbandingan pagu anggaran dengan realisasi

anggaran terjadi efisiensi anggaran sebesar **Rp. 9.454.315,-** akibat adanya penawaran harga pada setiap aitem belanja oleh penyedia.

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pada Tahun Anggaran Perubahan 2024 untuk pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung yang bersumber dari APBD secara keseluruhan sebesar **Rp. 100.984.471.546 ,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 63.375.622.629 ,-** atau sama dengan **63%**. Dari perbandingan pagu anggaran keseluruhan dengan realisasi anggaran terjadi efisiensi anggaran sebesar **Rp. 37.608.848.917 ,-** akibat adanya penawaran harga pada setiap aitem belanja oleh penyedia dan anggaran pemeliharaan dengan system real cost serta adanya jabatan yang masih kosong sehingga anggaran gaji dan tunjangan ASN tidak dapat direalisasikan.

Alokasi anggaran untuk Program Prioritas dalam pencapaian sasaran strategis sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebesar **Rp. 81.036.257.614,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 49.013.320.635,-** atau sama dengan **60 %**. Dari perbandingan pagu anggaran dengan realisasi anggaran terjadi efisiensi anggaran sebesar **Rp. 32.022.936.979,-** akibat adanya penawaran harga pada setiap aitem belanja oleh penyedia dan anggaran pemeliharaan dengan system real cost.

Pagu dan realisasi anggaran belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung pada Anggaran Perubahan Tahun 2024 sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2024 serta alokasi anggaran dan realisasi dari masing- masing program dan kegiatan serta sub kegiatan untuk pencapaian indikator sasaran strategis Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2024 sebagaimana tabel 3.12 berikut :

Tabel 3.10
Pagu Anggaran Dan Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Capaian Indikator Sasaran Strategis
Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDKATOR KINERJA SASARAN UTAMA	TARGET/ SATUAN	REALISASI/ SATUAN	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN 2024 (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	SELISIH (RP)	%				
Meningkatnya tatakelola pemerintahan serta kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi	1 Persentase aplikasi pemerintahan yang terintegrasi	60%	72%	Aplikasi Informatika	Kegiatan :	4	2.690.911.850	2.098.313.940	(592.597.910)	78%				
					1 Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									
					Sub Kegiatan :		969.134.692	970.412.000	(555.078.200)	43%				
					1 Penatalaksanaan Dan Pengawasan E-Government Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota									
					2 Pengembangan Aplikasi Dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik						1.757.004.950	1.539.561.750	(23.207.110)	98%
					3 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah						177.883.900	177.883.900	(14.031.900)	92%
					4 Pengembangan Dan Pengelolaan EkosistemKabupaten/Kota Cerdas Dan Kota Cerdas						3.054.200	3.054.200	(280.700)	91%
					Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota						Kegiatan :	2	96.569.650	94.508.620
				1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
				Sub Kegiatan :		49.446.595	48.380.560	(1.066.035)	98%					
				1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
				2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						47.123.055	46.128.060		(994.995)	98%
				Kegiatan :										

					1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		17.629.888.516	12.875.744.931	(4.754.143.585)	73%
						Sub Kegiatan :	4				
					1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		17.597.696.516	12.848.197.431	(4.749.499.085)	73%
					2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD		20.264.400	16.872.200	(3.392.200)	83%
					3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		2.848.000	2.611.600	(236.400)	92%
					4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		9.079.600	8.063.700	(1.015.900)	89%
						Kegiatan :					
					1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		84.166.455	83.628.132	(538.323)	99%
						Sub Kegiatan :	1				
					1	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		84.166.455	83.628.132	(538.323)	99%
						Kegiatan					
					1	Administrasi Umum Perangkat Daerah		253.295.199	235.677.000	(17.618.199)	93%
						Sub Kegiatan :	5				
					1	Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		22.268.820	19.829.000	(2.439.820)	89%
					2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		176.230.700	163.544.000	(12.686.700)	93%
					3	Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan		11.788.300	10.571.500	(1.216.800)	90%
					4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		40.296.000	39.330.000	(966.000)	98%
					5	Fasilitasi Kunjungan Tamu		2.711.379	2.402.500	(308.879)	89%

					Kegiatan					
					1 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3	607.006.328	301.711.000	(305.295.328)	50%
					Sub Kegiatan :					
					1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		198.629.172	-	(198.629.172)	0%
					2 Pengadaan Mebel		49.628.749	41.800.000	(7.828.749)	84%
					3 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		358.748.407	259.911.000	(98.837.407)	72%
					Kegiatan :					
					1 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		299.267.180	244.027.231	(55.239.949)	82%
					Sub Kegiatan :	3				
					1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		129.815.180	128.911.080	(904.100)	99%
					2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		167.452.000	113.116.151	(54.335.849)	68%
					3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		2.000.000	2.000.000	-	100%
					Kegiatan					
					1 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	978.020.604	527.005.080	(451.015.524)	54%
					Sub Kegiatan :					
					1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		139.769.220	98.387.020	(41.382.200)	70%
					2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		717.219.560	389.588.060	(327.631.500)	54%

				3	Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya		121.031.824	39.030.000	(82.001.824)	32%
2	Persentase lokasi yang terkoneksi jaringan intranet/ internet di Kabupaten Badung	-	-	Aplikasi Informatika	Kegiatan : 1 Kegiatan Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1 Pendaftaran nama domain pemerintah kabupaten / kota 2 Penatalaksanaan Dan Pengawasan Nama Domain Dan Sub Domain Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 3 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	3	69.314.546.914	39.199.945.415	(30.114.601.499)	57%
3	Indeks keterbukaan informasi publik	80	98,67	Informasi dan Komunikasi Publik	Kegiatan : 1 Kegiatan Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1 Monitoring Opini Dan Aspirasi Publik 2 Pengelolaan Konten Dan Perencanaan Media Komunikasi Publik 3 Pelayanan Informasi Publik	3	8.634.235.643	7.374.303.200	(1.259.932.443)	85%
4	Persentase Kelompok KIM yang melaksanakan diseminasi informasi kebijakan dan Program	89%	95%	Informasi dan Komunikasi Publik	Kegiatan : 1 Kegiatan Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		299.818.567	256.564.480	(43.254.087)	86%

	Prioritas Nasional dan prioritas daerah.				Sub Kegiatan :	5				
					1 Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik		170.335.821	143.328.280	(27.007.541)	84%
					2 Pengelolaan Media Komunikasi Publik		19.119.142	10.455.900	(8.663.242)	55%
					3 Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan		7.555.534	6.761.100	(794.434)	89%
					4 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media Dan Kemitraan Komunitas		44.920.344	41.206.600	(3.713.744)	92%
					5 Layanan Hubungan Media		57.887.726	54.812.600	(3.075.126)	95%
Meningkatnya tata kelola persandian untuk menjaga kerahasiaan serta keamanan informasi dan komunikasi di lingkungan pemerintah daerah	5 Prosentase informasi daerah yang terjaga kerahasiaan dan keamanannya sesuai perundang-undangan.	100%	100%	Penyelenggara an Persandian untuk Pengamanan Informasi	Kegiatan : 1 Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi Dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan Dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 3 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 4 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan : 1 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah kabupaten/Kota Sub Kegiatan :	4 <				

					1 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		4.094.800	3.386.700	(708.100)	83%	
Tersedianya data statistik sektoral dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.	6	Persentase data statistik sektoral Kabupaten Badung yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah dalam melakukan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	100%	100%	Penyelenggara an Statistik Sektoral	Kegiatan : 1 Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabuapten /Kota Sub Kegiatan : 1 Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis Dan Desiminasi Data Statistik Sektoral 2 Peningkatan Kapasitas Sdm Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah Yang Terintegrasi 3 Membangun Metadata Statistik Sektoral	3	79.759.415 7.083.700 62.750.890 9.924.825	70.305.100 5.822.200 55.865.700 8.617.200	(9.454.315) (1.261.500) (6.885.190) (1.307.625)	88,15% 82% 89% 87%
						44	100.984.471.546	63.375.622.629	(37.608.848.917)	62,76%	

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan suatu hal yang sangat penting dalam mengaplikasikan berbagai persoalan pembangunan sebagai wujud nyata tanggung jawab pemerintah dalam menghadapi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan transparansi sebagai nafas setiap gerak dan aktivitas pembangunan dalam upaya menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru.

I. Dilihat dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas , Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator sasaran	Target	Realisasi	Capaian kinerja
1. Meningkatnya tatakelola pemerintahan serta kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi	1. Persentase aplikasi pemerintahan yang terintegrasi	60%	72 %	120 %
	2. Persentase lokasi yang terkoneksi jaringan intranet/internet di Kabupaten Badung	-	-	100 % (terealisasi ditahun 2023)
	3. Indeks keterbukaan informasi publik	80	98.67%	123.34%
	4. Persentase Kelompok KIM yang melaksanakan diseminasi informasi kebijakan dan Program Prioritas Nasional dan prioritas daerah	89 %	95 %	106 %

2. Meningkatnya tata kelola persandian untuk menjaga kerahasiaan serta keamanan informasi dan komunikasi di lingkungan pemerintah daerah	5. Prosentase informasi daerah yang terjaga kerahasiaan dan keamanannya sesuai perundang-undangan	100 %	100 %	100 %
3. Tersedianya data statistik sektoral dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.	6. Persentase data statistik sektoral Kabupaten Badung yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah dalam melakukan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	100%	100 %	100 %

Dengan demikian, untuk target rata-rata indikator sasaran pada tahun 2024 dapat direalisasikan sebesar **107,11 %** sudah diatas target dan berjalan dengan baik. Bahkan untuk indikator Persentase aplikasi pemerintahan yang terintegrasi terealisasi sebesar **120 %** dan indikator Indeks keterbukaan informasi publik terealisasi sebesar **123.34%**, serta indicator Persentase Kelompok KIM yang melaksanakan diseminasi informasi kebijakan dan Program Prioritas Nasional dan prioritas daerah sebesar **106 %**.

- II. Alokasi APBD pada Perubahan Anggaran Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika secara keseluruhan sebesar **Rp. 100,984,471,546,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 63,375,622,629,-** atau sama dengan **63 %**. Dari perbandingan pagu anggaran keseluruhan dengan realisasi anggaran terjadi efisiensi anggaran sebesar **Rp. 37,608,848,917,-**. Dan untuk Program Prioritas dalam pencapaian sasaran strategis sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebesar **Rp. 81,036,257,614,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 49,013,320,635,-** atau sama dengan **60 %**. Dari perbandingan pagu anggaran dengan realisasi anggaran terjadi efisiensi anggaran sebesar **Rp. 32,022,936,979,-**. Serta target Pendapatan di Anggaran Perubahan Tahun 2024.

4.2 SARAN

Dengan Laporan Akuntabilitas ini maka dapat diketahui tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas kedinasan berkaitan dengan Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik dan Urusan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika di wilayah Kabupaten Badung. Selanjutnya pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan hendaknya dapat terlaksana berkesinambungan dengan memperoleh Pagu Anggaran sesuai dengan kebutuhan demi tercapainya target yang sudah ditetapkan. Akhirnya kami berharap semoga laporan ini dapat memberikan manfaat kepada kita.

Mangupura, 06 Maret 2025

Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Badung,



I Gusti Ngurah Gede Jaya Saputra, S.Sos.,M.A.P

Pembina Utama Muda

NIP. 19750207199311 1 002